

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMODERASI LITERASI
KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP
KINERJA UMKM DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**



Disusun oleh:

SURYADI

NIM 20402400362

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
2025**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMODERASI LITERASI
KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP
KINERJA UMKM DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Disusun Oleh :

Suryadi

NIM: 20402400362

Telah disetujui oleh pembimbing
dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan panitia sidang ujian tesis
Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جعفر الإسلامية
Semarang, 28 Agustus 2025

Pembimbing



Prof. Dr. Dra. Alifah Ratnawati, MM.

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMODERASI LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Disusun Oleh :
Suryadi
NIM: 20402400362

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 1 September 2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Prof. Dr. Dra. Alifah Ratnawati, MM

Penguji I

Prof. Dr. Mutamimah, S.E., M.S.I

Penguji II

Dr. Siti Sumiati, S.E., M.Si

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen
Pada tanggal 4 September 2025

Ketua Program Pasca Sarjana



Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si
NIK. 210491028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Kinerja UMKM.....	8
2.1.2 Literasi Keuangan.....	10
2.1.3 Inklusi Keuangan.....	12
2.1.4 Peran Pemerintah.....	14
2.2 Pengembangan Hipotesis.....	16
2.2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	16
2.2.2 Hubungan Antar Variabel.....	18
2.2.2.1 Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM.....	18
2.2.2.2 Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM.....	20

2.2.2.3 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM dengan Moderasi Peran Pemerintah.....	21
2.2.2.4 Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM dengan moderasi peran Pemerintah.....	22
2.3 Model Empirik.....	23
BAB III METODELOGI PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Populasi dan Sampel.....	24
3.3 Sumber Data dan Jenis Data	25
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.5 Definisi Operasional Variabel dan Indikator.....	27
3.6 Teknik Analisis.....	28
3.6.1 Outer Model.....	29
3.6.1.1 Convergen Validity.....	29
3.6.1.2 Discriminant Validity.....	30
3.6.1.3 Composite Reliability.....	30
3.6.2 Inner Model.....	31
3.6.2.1 R-Square.....	31
3.6.2.2 Path Coeficients.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Deskripsi Responden.....	33
4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	33
4.1.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pernikahan.....	34
4.1.4 Karakteristik Responden berdasarkan Status Pendidikan terakhir.....	35

4.1.5 karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	35
4.2 Analisis Deskripsi.....	36
4.2.1 Tanggapan Responden terhadap Inklusi Keuangan (X2).....	38
4.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Literasi Keuangan (X1).....	39
4.2.3 Tanggapan Responden Terhadap Kinerja UMKM(Y).....	42
4.2.4 Tanggapan Responden Terhadap Peran pemerintah (Z).....	43
4.3 Analisis Data.....	45
4.3.1 Outer Model.....	46
4.3.2 Inner Model.....	51
4.4 Pembahasan.....	56
4.4.1 Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM.....	56
4.4.2 Pengaruh Inklusi terhadap Kinerja UMKM.....	57
4.4.3 Peran Pemerintah Memoderasi Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM.....	58
4.4.4 Peran Pemerintah Memoderasi Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	61
Daftar Pustaka.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor vital dalam perekonomian Indonesia. UMKM memainkan peran krusial dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara serta dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023, UMKM menyumbang 61% dari PDB Indonesia dan menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional. Jumlah pelaku usaha di sektor UMKM tercatat sebanyak 67 juta (Junaidi, 2023). Sektor ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan peluang kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM juga sering menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menggerakkan berbagai sektor industri, perdagangan, dan jasa di berbagai daerah. Dukungan dan pengembangan UMKM sangat penting untuk memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan.

Namun, banyak UMKM di Indonesia yang masih kesulitan untuk berkembang dan bersaing. Pada awal Maret 2024, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengungkapkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah kurangnya koneksi dengan industri, sehingga rantai pasok dan transfer teknologi belum terbangun dengan baik (Lestari, 2024). Saat ini, di Kabupaten Kutai Timur, terdapat 300 data UMKM yang terakomodir oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur dari total 12.752 UMKM

yang ada di wilayah tersebut. Angka ini dianggap belum mencapai tingkat yang dianggap ideal karena jauh dari total UMKM yang terdapat di Kutai Timur sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi yang lebih baik dari pihak pelaku usaha kecil dan menengah di Kutai Timur, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki.

Permasalahan umumnya, meskipun perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah meningkat dengan signifikan, namun angka tersebut kurang bias mengimbangi peningkatan kualitas dari berbagai sudut pandang. Masalah klasik terutama adalah rendahnya produktivitas. Salah satu faktor rendahnya produktivitas adalah buruknya kualitas sumber daya manusia, kurangnya kemampuan dalam menjalankan kegiatan manajemen, organisasi, dan pemasaran. Kurangnya teknologi yang baik dan lemahnya jiwa wirausaha para pelakunya. Di samping itu, usaha mikro, kecil, dan menengah sering mengalami kesulitan dalam memperoleh akses ke modal, informasi, teknologi, pasar, serta elemen produksi lainnya. Mereka juga menghadapi tantangan dari luar, seperti biaya transaksi yang tinggi akibat kurangnya dukungan iklim usaha dan kelangkaan bahan mentah seperti listrik, bahan bakar, dan transportasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur mempunyai beberapa tanggung jawab dan wewenang di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, salah satunya adalah kinerja UMKM.

Kinerja suatu UMKM sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM tersebut. Sehingga tujuan dari UMKM adalah memaksimalkan nilai usaha yang tercermin dalam kinerja UMKM tersebut. Selain itu masih banyak dari pelaku UMKM ini tidak memiliki pandangan atau bahkan tidak memiliki pengetahuan

yang luas, sehingga tidak berorientasi kepada jangka panjang terhadap usahanya, karena hal tersebutlah yang membuat upaya untuk meningkatkan kinerja UMKM yang cenderung bersifat konvensional, sehingga para pelaku UMKM seringkali keliru dalam mengukur produktivitas usahanya yang pada akhirnya berdampak pada kinerja UMKM (Nurhadianthy & Anis, 2023) Maka dari itu masalah tersebut apabila tidak ditangani maka akan berdampak pada kinerja UMKM.

Mengingat pentingnya kinerja UMKM bagi pertumbuhan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian terutama di Kabupaten Kutai Timur, jadi ada beberapa hal yang berpotensi bisa berdampak pada kinerja UMKM, diantaranya yakni pengetahuan keuangan, inklusi keuangan, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, serta kualitas pelayanan yang diberikan. Para pelaku usaha manapun pasti menginginkan kualitas kinerja yang baik dari waktu ke waktu tak terkecuali para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Namun untuk bisa menjadikan kinerja UMKM semakin baik maka UMKM harus memiliki pengetahuan tentang keuangan agar bisa mengelola keuangan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang dapat meningkatkan kinerja UMKM diantaranya literasi keuangan dan inklusi keuangan serta peran pemerintah.

Faktor literasi keuangan merupakan proses untuk meningkatkan ilmu, keahlian dan kepercayaan bahwa seseorang dapat mengatur uang masuk dan uang keluar agar semakin baik dan efektif (Septiani & Wuryani, 2020). UMKM yang memiliki literasi keuangan yang baik maka akan dapat menentukan rencana yang strategis untuk melihat peluang dan risiko, dan mempunyai akses keuangan yang cukup, serta dapat menghadapi ketidakstabilan perubahan iklim bisnis sehingga pengambilan keputusan yang dibuat akan memberikan solusi yang inovatif dan

terarah untuk meningkatkan kinerja UMKM (Sanistasya et al., 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Krismalinda, 2022) bahwa literasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Penelitian oleh (Saphira, 2024) juga menambahkan bahwa literasi keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Fitria et al., 2021) menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, (Naufal & Purwanto, 2022) juga menambahkan bahwa literasi keuangan tidak memberikan kontribusi terhadap kinerja usaha dan keberlangsungan usaha. Hal tersebut bisa disebabkan pelaku UMKM cenderung memiliki tenaga ahli keuangan sendiri untuk menjalankan usaha, sehingga secara personal pemilik UMKM tidak memiliki pandangan bahwa literasi keuangan berdampak pada kinerja UMKM.

Faktor inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses keuangan terhadap layanan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OJK & Badan Pusat Statistik, 2024). Persebaran UMKM, memberikan efek terhadap perkembangan ekonomi masyarakat akhirnya mereka memiliki kesempatan luas dalam berwirausaha, akan tetapi para pelaku usaha masih kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena sulitnya akses terhadap layanan jasa keuangan. Seperti yang dikatakan oleh (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021) bahwa sulitnya akses terhadap layanan jasa keuangan terkhusus akses dalam hal pembiayaan terjadi karena tidak terpenuhinya persyaratan permohonan pembiayaan. Oleh karena itu untuk menangani permasalahan tersebut tindakan yang dapat diambil dalam mengatasi permasalahan permodalan ialah dengan melaksanakan inklusi keuangan (Yanti, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Maharani, 2022) bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Penelitian oleh (Mali, 2023) juga menemukan bahwa inklusi keuangan mempermudah akses keuangan UMKM sehingga UMKM dengan mudah mendapatkan modal usaha untuk memaksimalkan kinerja usaha. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021) bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha. Ada juga dampak negatif yang perlu diwaspadai, seperti risiko utang yang tinggi, biaya kredit, dan keamanan data.

Sedangkan faktor peran pemerintah adalah suatu kegiatan lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia guna mencapai tujuan tertentu. Pada awalnya peran pemerintah adalah sebagai menjaga keamanan dan ketertiban. Bahkan seringkali fungsi pembayaran pajak tidak diperuntukan kepada rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional. Kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha pembangunan dan pembaruan terhadap masyarakat Indonesia (Herlyansyah, 2021). Peran pemerintah sangat penting untuk mendorong UMKM untuk maju dan berhasil. Peran pemerintah yang efektif dalam pengembangan UMKM, yaitu sebagai regulator, fasilitator dan katalisator (Humaira, 2020). Penelitian oleh (Rahmah et al., 2020) menyatakan bahwa peran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja usaha. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh (Nugraha et al., 2022) bahwa peran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas tersebut, maka judul dalam penelitian ini adalah “Peran Pemerintah Dalam Memoderasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Kutai Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kinerja UMKM di Kabupaten Kutai Timur . Sedangkan pertanyaan penelitiannya adalah sbb :

1. Bagaimana pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Kutai Timur?
2. Bagaimana pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Kutai Timur?
3. Bagaimana Peran Pemerintah dalam memoderasi pengaruh Literasi Keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Kutai Timur?
4. Bagaimana peran pemerintah dalam memoderasi pengaruh Inklusi Keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Kutai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Kutai Timur.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM dengan Peran Pemerintah di Kabupaten Kutai Timur.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM dengan Peran Pemerintah di Kabupaten Kutai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran pemerintah dalam memoderasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Kutai Timur serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang peran pemerintah dalam memoderasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Kutai Timur.
- b. Bagi UMKM, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan umum tentang peran pemerintah dalam memoderasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja UMKM

Kinerja usaha disebut juga sebagai salah satu ukuran prestasi dari sebuah usaha yang didapatkan melalui aktivitas produksi dan pemasaran secara keseluruhan yang berasal dari organisasi bisnis. Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diartikan sebagai ukuran tercapainya usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok yang mengelola unit usaha berdasarkan target atau standar yang telah ditentukan sebelumnya, dimana usaha tersebut masuk dalam kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Hendrawan & Wijaya, 2020). Dalam mengelola sumber daya UMKM yang dimiliki dengan menjaga kinerja yang memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha yang harus dilakukan. Pengelolaan kinerja UMKM dapat juga dijadikan acuan dalam menentukan berkembangnya suatu usaha yang dijalankan (Mukoffi & As'adi, 2021). Oleh karena itu kinerja UMKM harus diberikan perhatian khusus agar dapat berkembang dan bersaing.

Menurut (Mutegi et al., 2015), kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang diraih individu yang menyesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut pada suatu perusahaan dalam periode tertentu, yang dikaitkan dengan sebuah ukuran nilai atau standar tertentu pada perusahaan individu tersebut bekerja. Kinerja UMKM merupakan salah satu sasaran terpenting bagi manajemen keuangan yaitu dengan memaksimalkan kemakuran pemilik selain memaksimalkan nilai perusahaan. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia,

sebagai fondasinya. Untuk mendorong peningkatan ekonomi makro serta mikro, UMKM harus dapat tumbuh serta membagikan pengaruh positif berkenaan sektor-sektor lainnya. Perekonomian negara ini membutuhkan peran serta aktif baik UMKM maupun usaha besar agar dapat tumbuh serta berkembang. UMKM memiliki kapasitas untuk membagikan kontribusi yang signifikan berkenaan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) negara berkembang ini (Utami & Mulyaningsih, 2016).

Kinerja UMKM mengacu pada hasil yang diperoleh individu ataupun organisasi saat menjalankan tugas yang diberikan, yang dipengaruhi oleh kemampuan, keahlian, dedikasi, serta waktu yang diinvestasikan (Wahyudiati, 2017). Kinerja UMKM mengacu pada output yang dihasilkan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu, yang secara langsung terkait dengan nilai ataupun standar kualitas UMKM tempat mereka bekerja. Kinerja mengacu pada tingkat pencapaian yang dicapai oleh individu ataupun organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kinerja mengacu pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara strategis oleh suatu organisasi, disertai dengan perilaku yang diantisipasi dari organisasi tersebut. Jika UMKM mencapai keberhasilan, mereka secara bertahap akan tumbuh lebih kuat serta berfungsi sebagai fondasi ekonomi, memainkan peran yang semakin signifikan dalam ekonomi nasional (Aribawa, 2016).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang diraih secara keseluruhan serta dibandingkan pada hasil kerja, sasaran, target maupun kriteria yang telah ditetapkan didalam undang-undang.

Indikator-indikator kinerja UMKM adalah volume penjualan, pertumbuhan pelanggan, kenaikan laba, porsi pasar (Sari & Farida, 2020):

1. Volume penjualan. Volume penjualan yaitu total penjualan yang didapat dari komoditas yang diperdagangkan dalam suatu masa tertentu.
2. Pertumbuhan pelanggan. Pertumbuhan pelanggan merupakan keunggulan, penambahan tingkat pelayanan yang efektif dari berbagai jenis fasilitas yang keseluruhannya berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan pelanggan.
3. Kenaikan laba. Kenaikan laba dapat dihasilkan perusahaan dalam bentuk laba bersih yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan bahwa kondisi kinerja perusahaan juga baik, jika kondisi ekonomi baik pada umumnya pertumbuhan perusahaan baik.
4. Porsi pasar. Porsi pasar yaitu menunjukkan seberapa besar kontribusi produk yang ditangani dapat menguasai pasar untuk produk sejenis di banding kompetitor.

2.1.2. Literasi Keuangan

Menurut (Azizah, 2020), literasi keuangan yaitu syarat wajib bagi setiap orang untuk menghindari masalah keuangan. Menurut (Pusparani, 2019), literasi dapat diartikan kemampuan untuk memahami, jadi financial literacy ialah kemampuan untuk mengelola keuangan yang mereka miliki untuk mengembangkan hidup agar lebih berkualitas dimasa yang akan datang. Menurut (Sholeh, 2019), bahwa literasi keuangan adalah kemampuan tentang pengetahuan seseorang yang berkaitan dengan pengelolaan financial, dan dengan kemampuan literasi financial seseorang akan berdampak pada peningkatan taraf hidup seseorang tersebut.

Menurut (Purwidiyanti & Tubastuvi, 2019) Literasi keuangan merupakan suatu gabungan dari pengetahuan, kemampuan dan sikap dalam mengelola keuangan. Menurut (Chaidir et al., 2020) juga sependapat bahwa literasi keuangan adalah suatu keterampilan dan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan. Menurut (Arianti, 2022) Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sikap dan perilaku yang terbentuk ini menjadikan individu lebih cermat dalam pengambilan keputusan saat melakukan pembelian. Menurut (Khuc et al., 2022) literasi keuangan merupakan cerminan pengetahuan keuangan, sikap, dan perilaku untuk membuat keputusan keuangan dan meningkatkan kekayaan.

Berdasarkan pengertian literasi keuangan diatas yaitu literasi keuangan itu berarti guna menambah keahlian pengelolaan keuangan orang serta literasi keuangan, sehingga berperan sebagai pengetahuan serta uraian atas konsep serta risiko keuangan dan ketrampilan, motivasi serta kepercayaan buat mempraktikkan pengetahuan serta uraian yang dipunyai dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efisien, tingkatkan kesejahteraan keuangan orang serta masyarakat dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi.

Indikator literasi keuangan merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengetahui tingkatan literasi individu. Menurut OECD *International Network on*

Financial Education dalam (Soetiono & Setiawan, 2018) indikator terbagi menjadi tiga yaitu:

1. *Financial Knowledge* (Pengetahuan Keuangan). Pengetahuan keuangan merupakan pemahaman mengenai masalah keuangan pribadi, hal ini diketahui dan diukur melalui tingkat pemahaman individu dalam konsep keuangan pribadi. Dengan pengetahuan mengenai keuangan, individu dapat mengambil keputusan melalui berbagai pertimbangan dengan tepat.
2. *Financial Behavior* (Perilaku keuangan). Indikator literasi keuangan ini berorientasi untuk spending and saving. Dapat diartikan bahwa financial behavior merupakan kemampuan dalam perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pendendalian dan penyimpanan keuangan sehari-hari.
3. *Financial Attitude* (Sikap Keuangan). *Financial Attitude* merupakan penilaian, pandangan terhadap keuangan yang diterapkan ke dalam sikapnya. Uang merupakan hal penting yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, maka individu akan berfikir bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan uang tersebut, dan membuat individu memiliki pandangan mengenai keuangan yang dimiliki untuk masa depan.

2.1.3. Inklusi Keuangan

Menurut World Bank dalam (Yuliyanti & Pramesti, 2021) menyatakan bahwa Inklusi Keuangan merupakan kemudahan akses bagi setiap individu ataupun bisnis agar dapat menggunakan produk dan layanan keuangan yang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti pembayaran, menabung, dan kredit. Inklusi keuangan merupakan suatu proses mempromosikan akses yang terjangkau, tepat waktu, dan memadai terhadap berbagai produk dan layanan keuangan serta memperluas penggunaan oleh semua segmen masyarakat

melalui pendekatan-pendekatan yang inovatif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan inklusi keuangan (Holle, 2020).

Berdasarkan pernyataan *Center for Financial Inclusion* inklusi keuangan merupakan akses terhadap produk keuangan, seperti pembiayaan, asuransi, tabungan, dan pembayaran serta ketersediaan akses yang berkualitas yang terdiri dari kenyamanan, jangkauan, perlindungan, kesesuaian, dan ketersediaan terhadap pelayanan kepada masyarakat (Kusuma et al., 2021). Manfaat inklusi keuangan adalah memberikan pemahaman pada masyarakat, membantu untuk meningkatkan pemerataan ekonomi, mempersiapkan perencanaan keuangan dengan baik, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Yuliyanti & Pramesti, 2021).

Menurut (Cristanti et al., 2021) merupakan kegiatan yang menyeluruh dan memiliki tujuan untuk menghilangkan hambatan baik berbentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat saat menggunakan layanan jasa keuangan. Menurut (Yanti, 2019) inklusi keuangan adalah sebuah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Beberapa macam layanan jasa keuangan yang penting keberadaannya yaitu layanan penyimpanan dana, kredit, sistem pembayaran, asuransi, dan dana pensiun sehingga masyarakat dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.

Dari penjelasan teori tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa inklusi keuangan merupakan seluruh usaha yang bertujuan untuk memberikan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan dalam rangka

memanfaatkan konsep biaya rendah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Inklusi keuangan memiliki empat indikator (Yanti, 2019) di antaranya :

1. Ketersediaan akses. Ketersediaan akses merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan agar dapat melihat potensi hal-hal yang menjadi hambatan dalam membuka dan menggunakan rekening bank, seperti bentuk fisik layanan jasa keuangan, layanan digital perusahaan, dll.
2. Penggunaan. Penggunaan merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur penggunaan jasa keuangan dan produk, seperti frekuensi, waktu/lama penggunaan dan keteraturan.
3. Kualitas. Kualitas merupakan faktor yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.
4. Kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

2.1.4. Peran Pemerintah

Pemerintah merupakan landasan yang mendorong berkembangnya kewirausahaan suatu negara. Peran pemerintah terbagi menjadi 2, peran pemerintah sebagai fasilitator adalah memfasilitasi usaha untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh usaha (Nirwana et al., 2017). Peran pemerintah sebagai regulator adalah pembuat kebijakan kebijakan yang berhubungan pembinaan dan pengembangan usaha, dimana kebijakan tersebut

dimaksudkan untuk mempermudah usaha, agar tumbuh dan berkembang dengan mudah.

Kebijakan pemerintah untuk membiayai kewirausahaan di Indonesia bernama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program Kredit Usaha Rakyat adalah program prioritas kebijakan pemerintah dalam hal pemberian kredit/pembiayaan kepada wirausaha. Individu/ perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif sebagai penerima program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan sumber dana 100% dari dana penyaluran program berdasarkan 9% suku bunga efektif per tahun atau sama dengan suku bunga flat yang setara. Tujuannya sesuai dengan UU No.20 sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan para pelaku UKM.

Menurut (Arwan, 2018), peran pemerintah dalam pengembangan usaha ditunjukkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai wujud kebijakan pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kewirausahaan di Indonesia. Menurut (Desmaryani, 2018), dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran pemerintah berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha. Pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dan melakukan fungsi Pengawasan. Pemerintah mendukung pertumbuhan usaha melalui edukasi dan pelatihan, pemerintah membantu memasarkan produk melalui kemitraan, dan kebijakan mengenai pemberian pinjaman modal.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang terkait dengan praktik kewirausahaan ditujukan untuk mendorong kewirausahaan dengan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi wirausaha. Peran

pemerintah dalam penelitian ini mengacu pada indikator menurut (Obaji, 2014) yaitu kebijakan pemerintah, pelaksanaan kebijakan dan dana dari pemerintah.

Menurut (Obaji, 2014), indikator kebijakan pemerintah antara lain adalah:

1. *Supportive government policies*/kebijakan pemerintah yang mendukung. Pemerintah adalah pemimpin dari pembentukan, pensponsoran dan administrasi dari sebagian besar program pendukung, terutama di negara-negara berkembang, sebuah kebijakan dari pemerintah terkait dengan kewirausahaan akan berjalan untuk memastikan keberlanjutan dan praktik kewirausahaan yang positif.
2. *Policy implementation*/pelaksanaan kebijakan. Kebijakan dengan menetapkan kursus dan memberikan pemahaman untuk implementasi program pemerintah. Ini memandu pemikiran pemerintah dalam pelaksanaan suatu program dan menentukan arahnya.
3. *Government funding*/dana dari pemerintah. Aksesibilitas layanan moneter adalah salah satu faktor penting bagi keberlanjutan keberadaan mayoritas perusahaan yang baru dibentuk serta elemen penting dalam praktik kewirausahaan. Untuk mencapai pembangunan ekonomi melalui kewirausahaan, harus ada pola pendanaan di mana program dukungan dana secara terus-menerus.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Arrezqi et al., 2024), dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Rakyat Semarang Kuliner (RANGKUL)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM Rangkul. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui edukasi dan program-program pemberdayaan dapat membantu UMKM Rangkul dalam meningkatkan kinerjanya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pradipta & Kristianto, 2024), dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM Kuliner Kota Yogyakarta”. Berdasarkan hasil penelitian literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja UMKM. Literasi keuangan, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam mengelola keuangan, membantu pelaku usaha memahami konsep dasar keuangan dan produk keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Inklusi keuangan juga memberikan pengaruh signifikan dengan menyediakan akses yang luas terhadap produk dan jasa keuangan, memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal kerja, melakukan ekspansi bisnis, dan berinvestasi dalam teknologi, yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayadi et al., 2024), dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kota Serang”. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM. Inklusi Keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM. Literasi keuangan dan Inklusi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada UMKM di Kota Serang menunjukkan bahwa literasi

keuangan dan Inklusi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Heliani & Novitasari, 2024), dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Dan Finansial Teknologi Terhadap Kinerja UMKM di Kota Sukabumi”. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, finansial teknologi berpengaruh terhadap kinerja UMKM, serta literasi keuangan, inklusi keuangan, dan finansial teknologi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Sukabumi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rani & Desiyanti, 2024), dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Digital Payment Terhadap Kinerja UMKM Makanan & Minuman di Kota Padang”. Faktor literasi keuangan tidak mempengaruhi kinerja UMKM, dengan kata lain pengetahuan yang baik tidak mempengaruhi kinerja UMKM. Kinerja UMKM makanan dan minuman di Kota Padang tidak dipengaruhi oleh inklusi keuangan, dengan kata lain baik buruknya inklusi keuangan tidak berdampak pada baik buruknya kinerja UMKM. Digital payment memberikan dampak positif pada kinerja UMKM makanan dan minuman di Kota Padang, yang berarti penggunaan pembayaran digital yang baik dan banyak maka akan mempengaruhi kinerja UMKM menjadi lebih baik.

2.2.2. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM

Literasi keuangan merupakan pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam pengambilan keputusan keuangan (Lusardi Olivia Mitchell et al., 2013). Literasi keuangan mencakup kemampuan melakukan perhitungan dan mengambil keputusan investasi yang tepat, serta mengelola keuangan pribadi secara efektif. Hal ini tidak hanya melibatkan pengetahuan tentang konsep-konsep di bidang keuangan, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan mengomunikasikan konsep-konsep tersebut. Selain itu, literasi keuangan juga mencakup kecakapan dalam mengelola keuangan baik pribadi maupun perusahaan, serta kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang bijaksana dalam berbagai situasi dan kondisi. Jadi, literasi keuangan bersifat komprehensif, mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta kebijaksanaan dalam menerapkan semua hal tersebut dalam pengelolaan keuangan (Aribawa, 2016).

Dengan literasi keuangan yang baik, pelaku UMKM dapat mengelola keuangan bisnis mereka secara lebih efisien dan mengurangi risiko finansial, yang secara langsung berdampak positif pada peningkatan kinerja UMKM. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kinerja UMKM dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan yang dimiliki. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mutiara, 2023) dan (Sanistasya et al., 2019), yang menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Ini berarti bahwa kinerja UMKM akan meningkat seiring dengan peningkatan literasi keuangan. Penelitian ini juga didukung oleh (Amin et al., 2023), yang menyatakan bahwa literasi keuangan yang baik akan mendukung pola pikir pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis. Artinya, semakin tinggi pengetahuan keuangan yang

dimiliki, semakin baik pula usaha tersebut dijalankan. Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh pelaku UMKM juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam mengelola keuangan usaha.

Atas dasar uraian diatas, diajukan hipotesis 1 sbb :

H1: Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM

2. Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM

Inklusi keuangan merupakan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan mengacu pada akses yang luas terhadap layanan keuangan formal bagi seluruh masyarakat, termasuk UMKM. Dengan memiliki tingkat inklusi keuangan yang baik akan membuka jalan bagi UMKM untuk mengakses ketersediaan layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan berdampak pada peningkatan kinerja UMKM. Inklusi keuangan dapat diandalkan dalam mendorong peningkatan kinerja UMKM. Salah satu dampak yang diberikan inklusi keuangan yaitu memberikan akses yang baik pada pembiayaan bagi UMKM. Dengan adanya kemudahan akses ini, UMKM dapat mengembangkan usaha dan dapat meningkatkan kinerja. Dalam konteks teori teori RBV, inklusi keuangan dapat memperluas akses UMKM ke berbagai sumber daya finansial yang sebelumnya tidak tersedia. Dengan begitu, hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja UMKM. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Wulandari, 2019) yang menyatakan bahwa kemudahan akses keuangan dapat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kinerja usaha mereka, yang mana akan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan para

pelaku UMKM. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya (Yanti, 2019); (Rahardjo et al., 2019); yang menyatakan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Atas dasar uraian diatas, diajukan hipotesis 2 sbb :

H2: Inklusi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM

3. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM dengan moderasi Peran Pemerintah

Literasi keuangan merupakan faktor penting dalam keberhasilan UMKM. Literasi keuangan mencakup pemahaman terhadap konsep keuangan dasar, pengelolaan keuangan yang efektif, dan kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang bijaksana. UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, menghindari risiko keuangan, dan meningkatkan peluang pertumbuhan. Dukungan pemerintah juga berperan penting dalam keberlanjutan UMKM (Kilay et al., 2022). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi UMKM, termasuk kebijakan yang mendukung, akses ke pasar, pelatihan dan pendidikan, sumber daya keuangan, dan akses ke informasi yang relevan. Dukungan pemerintah yang efektif dapat membantu UMKM mengatasi tantangan operasional dan meningkatkan peluang pertumbuhan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyono & Hutahayan, 2021) bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha dengan pemerintah sebagai variabel moderasi. Atas dasar uraian diatas, diajukan hipotesis 3 sbb :

H3: Peran Pemerintah memoderasi secara positif pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM

4. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM dengan moderasi Peran Pemerintah

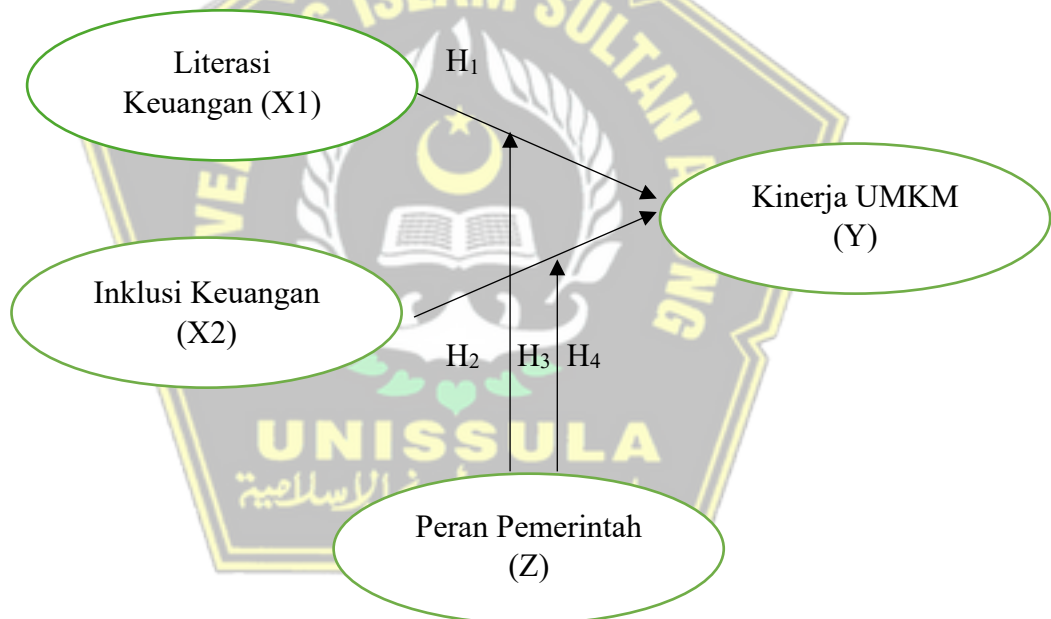
Inklusi keuangan sangat penting untuk keberlangsungan UMKM karena membuka akses terhadap layanan keuangan yang diperlukan untuk pengembangan dan pertumbuhan bisnis ini, dalam bisnis ini mencakup pembiayaan, layanan perbankan, asuransi, dan pendidikan keuangan (Hertadiani & Lestari, 2021). Dengan inklusi keuangan yang sangat kuat, maka UMKM dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan meningkatkan ketahanan ekonomi pada pelaku UMKM tersebut. Namun tantangan yang mereka hadapi adalah seperti kurangnya akses pengetahuan, dan infrastruktur yang masih sangat perlu diperhatikan untuk mencapai inklusi keuangan yang menyeluruh bagi seluruh pelaku UMKM (Utomo et al., 2024).

Peran oleh pemerintah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan UMKM tersebut karena UMKM tersebut memainkan peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah biasanya memberikan dukungan yang sangat penting bagi pelaku UMKM yang termasuk insentif, pembiayaan dengan suku bunga rendah, pelatihan dan Pendidikan, akses pasar, serta infrastruktur yang memadai bagi pelaku UMKM tersebut (Anggreani et al., 2021). Penelitian oleh (Anggreani et al., 2021) menyatakan peran pemerintah dapat memoderasi inklusi keuangan dalam kinerja UMKM. Atas dasar uraian diatas, diajukan hipotesis 3 sbb :

H4: Peran Pemerintah memoderasi secara positif pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM.

2.3. Model Empirik

Model empirik menggambarkan hubungan antara variabel yang akan diteliti dan merupakan suatu tuntunan untuk memecahkan suatu permasalahan penelitian serta digunakan untuk merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan yang dilengkapi gambar bagan penjelasan kuantitatif (Sugiyono, 2020). Kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang memungkinkan dilakukan pencatatan dan analisis data hasil penelitian secara pasti dengan menggunakan perhitungan-perhitungan *statistic* (Lodico et al., 2017). Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, analisis penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2020).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Populasi dalam penelitian ini yaitu UMKM Kabupaten Kutai Timur yang berada dikecamatan kongbeng dan Muara wahau. Jumlah populasi ini sebesar 150. Sedangkan sampel penelitian adalah bagian yang memberikan gambaran secara umum dari populasi. Sampel penelitian memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama dengan karakteristik populasi yang diamati (Sugiyono, 2020). Untuk lebih jelas Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne_2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*) atau 5%

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dengan menggunakan rumus Slovin, ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{150}{1 + 150 (5\%)^2} \\ &= \frac{150}{1,4} \\ &= 107,144 \end{aligned}$$

Dari perhitungan menggunakan rumus slovin maka didapatkan jumlah sampel minimum sebesar 107,144 responden, untuk memudahkan penulis dalam pengolahan data dan juga keakuratan penelitian maka jumlah sampel tersebut dibulatkan menjadi 107 UMKM di Kabupaten Kutai Timur. Jenis teknik penentuan sampel pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik ini adalah memilih sampel dari suatu populasi berdasarkan pertimbangan tertentu, dan dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sugiyono, 2020).

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan keterangan yang dapat dijadikan dasar-dasar kajian berupa analisis atau kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik

pengumpulan data yang sesuai agar hasil penelitian akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Menurut (Sugiyono, 2020) menjelaskan ada dua sumber data dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer didapat dengan melakukan pengamatan langsung ke objek yang dimaksud dalam penelitian ini.

Hasil data primer dapat dijadikan sebagai data pendukung untuk menganalisa dan mengambil keputusan. Data primer dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner kepada UMKM di Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari dokumen, *website* dan informasi dari orang lain. Data diperoleh untuk mendapatkan hasil teoritis dan menjadi referensi. Data sekunder didapat dari artikel, buku, jurnal penelitian ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan cara membuat atau menyusun daftar pertanyaan secara rinci dan lengkap. Kuesioner diserahkan kepada responden untuk dijawab secara bebas tanpa ada pengaruh dari peneliti. Menurut (Sugiyono, 2020) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan yang efisien apabila

peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang dapat diharapkan dari responden.

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah *skala likert*. Variabel yang diukur didiuraikan menjadi indikator variabel. Jawaban dari setiap item instrument *skala likert* memiliki bobot nilai skor yang berbeda-beda. Dalam *skala likert* nilai skor tertinggi diberikan untuk alternatif jawaban yang sangat diharapkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian, dan nilai skor terendah diberikan pada alternatif jawaban yang sangat tidak diharapkan (Silaen, 2018).

Tabel 3.1 Skor *Skala Likert*

Kriteria Jawaban	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Literasi Keuangan	Literasi keuangan merupakan pengetahuan atas konsep serta risiko keuangan, dan ketrampilan, sikap serta perilaku buat mempraktikkan pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Knowledge</i> (Pengetahuan Keuangan) 2. <i>Financial Behavior</i> (Perilaku keuangan) 3. <i>Financial Attitude</i> (Sikap Keuangan) (Soetiono & Setiawan, 2018) 	<i>Likert</i>
Inklusi Keuangan	Inklusi keuangan merupakan seluruh usaha yang bertujuan untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan akses 2. Penggunaan 	<i>Likert</i>

	memberikan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan dalam rangka memanfaatkan konsep biaya rendah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.	3. Kualitas 4. Kesejahteraan (Yanti, 2019)	
Kinerja UMKM	Kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang diraih secara keseluruhan serta dibandingkan pada hasil kerja, sasaran, target maupun kriteria yang telah ditetapkan didalam undang-undang.	1. Volume penjualan 2. Pertumbuhan pelanggan 3. Kenaikan laba 4. Porsi pasar (Sari & Farida, 2020)	<i>Likert</i>
Peran Pemerintah	Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah memfasilitasi usaha untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh usaha. Peran pemerintah sebagai regulator adalah pembuat kebijakan kebijakan yang berhubungan pembinaan dan pengembangan usaaga, dimana kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah usaha, agar tumbuh dan berkembang dengan mudah.	1. <i>Supportive government policies/</i> kebijakan pemerintah yang mendukung. 2. <i>Policy implementation/</i> pelaksanaan kebijakan. 3. <i>Government funding/</i> dana dari pemerintah. (Obaji, 2014)	<i>Likert</i>

3.6 Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan modeling persamaan struktural (SEM) melalui *software Smart PLS (Partial Least Squares)*. PLS (*Partial Least Squares*) merupakan metode analisis persamaan struktural yang berbasis varian, mampu menguji model pengukuran sekaligus model struktural. Ada beberapa alasan untuk mengadopsi PLS-SEM, di antaranya adalah tingkat konkordansi yang tinggi, di mana semakin besar sampel yang digunakan, semakin tinggi pula tingkat konkordansinya. Metode ini juga menguntungkan dalam hal

kekuatan statistik data, dapat dipakai untuk menguji efek prediksi antara variabel laten, termasuk efek mediasi atau moderasi, serta mendukung penggunaan model reflektif dan formatif tanpa memerlukan data yang terdistribusi normal dan dapat diaplikasikan pada sampel kecil (Hair, 2017). Menurut (Hair, 2017) model jalur PLS terdiri dari dua komponen utama. Pertama, model struktural (yang juga dikenal sebagai model internal dalam konteks PLS-SEM), yang menggambarkan hubungan (jalur) di antara konstruk atau variabel. Kedua, model pengukuran yang dikembangkan (juga disebut sebagai model eksternal dalam PLS-SEM), yang menunjukkan hubungan antara konstruk dengan variabel indikator.

3.6.1 Outer Model

Model eksternal, yang juga dikenal sebagai model relasional atau pengukuran eksternal, adalah suatu model yang menjelaskan hubungan antara setiap blok indikator dan variabel laten yang relevan. Model pengukuran berfungsi untuk menguji validitas konstruk serta reliabilitas alat yang digunakan. Uji validitas bertujuan untuk menentukan seberapa baik sebuah alat penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi alat ukur dalam mengukur konsep. Selain itu, uji ini juga dapat mengukur konsistensi responden dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan dalam kuesioner atau alat penelitian terkait masalah yang diteliti.

1. *Convergent Validity*

Validitas konvergen berkaitan dengan prinsip bahwa indikator struktur seharusnya memiliki korelasi yang tinggi. Uji validitas konvergen pada indikator reflektif dalam PLS didasarkan pada faktor *load factor*, yang merupakan korelasi antara skor item atau skor komponen dan skor struktur. Hal

ini bertujuan untuk mengukur struktur indikator yang perlu dievaluasi. Semakin tinggi nilai *factor loading*, semakin penting peranan loading tersebut dalam menjelaskan matriks faktor. Untuk menilai efektivitas konvergensi, nilai faktor pemuatan harus melebihi 0,7, dan nilai rata-rata ekstraksi varians harus lebih besar dari 0,5 (Hair, 2017).

2. *Discriminant Validity*

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa ukuran struktural yang berbeda seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Penilaian uji validitas diskriminan dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran *cross-loading* dari konstruk tersebut. Salah satu metode lain yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah dengan membandingkan akar AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk tersebut dan konstruk lainnya dalam model. Suatu model dianggap memiliki validitas diskriminan yang baik jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk lainnya dalam model (Hair, 2017).

3. *Composite Reliability*

Silakan juga memanfaatkan uji reliabilitas untuk mengevaluasi konsistensi internal instrumen pengukuran. Reliabilitas mencerminkan ketelitian, konsistensi, dan akurasi dari suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Uji reliabilitas dalam PLS dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu *alpha Cronbach* dan reliabilitas komposit. *Alpha Cronbach* berfungsi untuk mengukur batas minimum nilai reliabilitas konstruk, sementara reliabilitas komposit memberikan gambaran tentang nilai reliabilitas konstruk yang sesungguhnya. Meskipun demikian, saat mengestimasi konsistensi

internal struktur, keandalan gabungan dianggap lebih superior. Aturan umum untuk nilai reliabilitas *alpha* dan *composite* sebaiknya lebih dari 0,7, meskipun nilai 0,6 masih dianggap dapat diterima (Hair, 2017). Namun dalam praktek, jika validitas konstruk telah terpenuhi, uji konsistensi internal tidak selalu menjadi keharusan, karena konstruk yang valid pasti reliabel, tetapi konstruk yang reliabel belum tentu valid.

3.6.2 Inner Model

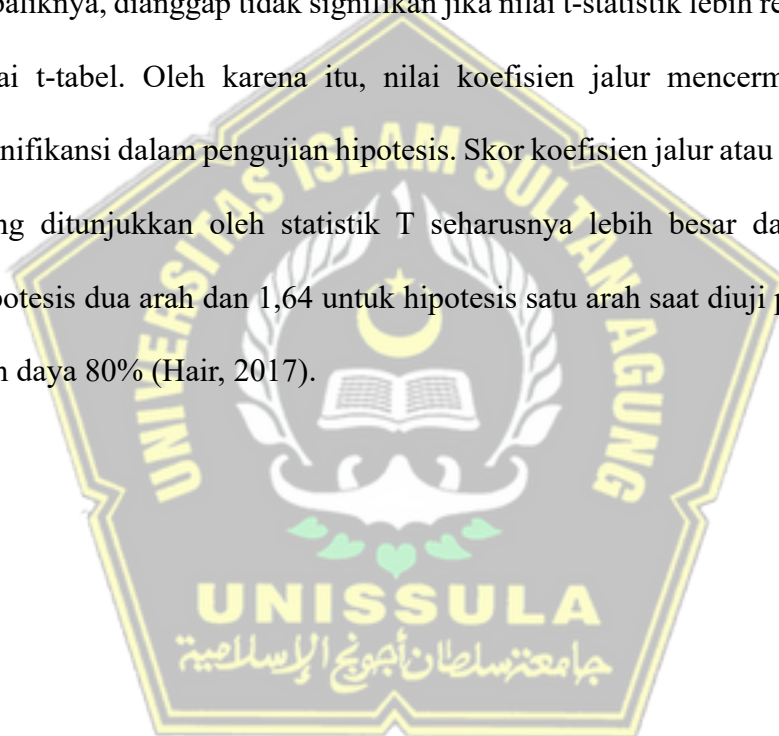
Model struktural dalam PLS menilai signifikansi antar konstruk dalam model struktural dengan memanfaatkan R^2 untuk mengevaluasi konstruk dependen, serta menggunakan nilai koefisien jalur atau nilai t untuk masing-masing jalur. R^2 berfungsi untuk mengukur sejauh mana perubahan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat; semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar pengaruh tersebut (Hair, 2017).

1. *R-Square*

Nilai R^2 berfungsi untuk mengukur tingkat perubahan dari variabel independen menjadi variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin baik kualitas model prediksi yang diusulkan. Sebagai contoh, jika nilai R^2 mencapai 0,7, ini menunjukkan bahwa 70% perubahan dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model tersebut. Meskipun demikian, R^2 tidak dapat dianggap sebagai parameter mutlak dalam menilai ketepatan suatu model prediksi, karena dasar hubungan teoritis adalah parameter yang paling penting dalam menjelaskan kausalitas (Hair, 2017).

2. *Path Coefficients*

Koefisien jalur mencerminkan hubungan atau tingkat pengaruh konstruk yang mendasarinya terhadap proses pemanduan. Pengujian hipotesis berkaitan dengan menguji hubungan antar variabel, yang dilakukan dengan menganalisis hasil pengujian secara parsial untuk masing-masing variabel. Untuk menentukan apakah variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen, analisis dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dengan nilai t tabel. Sesuatu dianggap signifikan jika nilai t-statistik melebihi nilai t-tabel; sebaliknya, dianggap tidak signifikan jika nilai t-statistik lebih rendah daripada nilai t-tabel. Oleh karena itu, nilai koefisien jalur mencerminkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien jalur atau model internal yang ditunjukkan oleh statistik T seharusnya lebih besar dari 1,96 untuk hipotesis dua arah dan 1,64 untuk hipotesis satu arah saat diuji pada alpha 5% dan daya 80% (Hair, 2017).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini mendeskripsikan persebaran dari segi jenis kelamin pada responden penelitian. Karakteristik ini juga memperlihatkan jumlah responden pada setiap kelas jenis kelamin yang telah ditentukan sebelumnya. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini, secara detail dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
Laki-laki	54	50.5
Perempuan	53	49.5
Total	107	100.0

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yang menunjukkan rata-rata responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini dengan jenis kelamin “Laki-Laki” sebanyak 54 orang atau 50.5%, jenis kelamin “Perempuan” sebanyak 53 orang atau 49.5%, dari tabel diatas dapat disimpulkan mayoritas responden jenis kelamin “Laki-Laki”.

4.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia pada penelitian ini mendeskripsikan persebaran dari segi usia pada responden penelitian. Karakteristik ini juga memperlihatkan jumlah responden pada setiap kelas usia

yang telah ditentukan sebelumnya. Karakteristik berdasarkan usia pada penelitian ini, secara detail dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Usia

Usia	Jumlah	Persen
>41 Tahun	33	30.8
21-30 Tahun	16	15.0
31-40 Tahun	58	54.2
Total	107	100.0

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan usia yang menunjukkan rata-rata responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini dengan usia “21-30 Tahun” sebanyak 16 orang atau 15.0%, usia “31-40 Tahun” sebanyak 58 orang atau 54.2%, sedangkan usia “>41 Tahun” sebanyak 33 orang atau 30.8%, dari tabel diatas dapat disimpulkan mayoritas responden usia “31-40 Tahun”.

4.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan pernikahan

Karakteristik responden berdasarkan status pernikahan pada penelitian ini mendeskripsikan persebaran dari segi status pernikahan pada responden penelitian. Karakteristik ini juga memperlihatkan jumlah responden pada setiap kelas status pernikahan yang telah ditentukan sebelumnya. Karakteristik berdasarkan status pernikahan pada penelitian ini, secara detail dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Status Pernikahan

Status Pernikahan	Jumlah	Persen
Menikah	107	100.0
Total	107	100.0

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan status pernikahan yang menunjukkan rata-rata

responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini dengan status pernikahan “Menikah” sebanyak 107 orang atau 100%, dari tabel diatas dapat disimpulkan mayoritas responden status pernikahan “Menikah”.

4.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada penelitian ini mendeskripsikan persebaran dari segi pendidikan terakhir pada responden penelitian. Karakteristik ini juga memperlihatkan jumlah responden pada setiap kelas pendidikan terakhir yang telah ditentukan sebelumnya. Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir pada penelitian ini, secara detail dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persen
Diploma (D1/D2/D3)	1	0.9
Sarjana (S1/S2/S3)	8	7.5
SMA	20	18.7
SMP	78	72.9
Total	107	100.0

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan pendidikan terakhir yang menunjukkan rata-rata responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini dengan pendidikan terakhir “SMP” sebanyak 78 orang atau 72.9%, pendidikan terakhir “SMA” sebanyak 20 orang atau 18.7%, pendidikan terakhir “Diploma (D1/D2/D3)” sebanyak 1 orang atau 0.9%, sedangkan pendidikan terakhir “Sarjana (S1/S2/S3)” sebanyak 8 orang atau 7.5%, dari tabel diatas dapat disimpulkan mayoritas responden pendidikan terakhir “SMP”.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Karakteristik responden berdasarkan lama usaha pada penelitian ini mendeskripsikan persebaran dari segi lama usaha pada responden penelitian. Karakteristik berdasarkan lama usaha pada penelitian ini, secara detail dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Persen
>5 Tahun	79	73.8
1-2 Tahun	5	4.7
3-4 Tahun	23	21.5
Total	107	100.0

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan lama usaha yang menunjukkan rata-rata responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini dengan lama usaha “1-2 Tahun” sebanyak 5 orang atau 4.7%, lama usaha “3-4 Tahun” sebanyak 23 orang atau 21.5%, lama usaha “>5 Tahun” sebanyak 79 orang atau 73.8%, dari tabel diatas dapat disimpulkan mayoritas responden pendidikan terakhir “>5 Tahun”.

4.2 Analisis Deskripsi

Berdasarkan pada penelitian ini, peneliti mendapat hasil jawaban dari 107 responden terhadap setiap pertanyaan dari variabel yang sudah disebarkan melalui kuesioner. Variabel tersebut meliputi : *Inklusi keuangan, Kinerja UMKM, Literasi keuangan, Peran Pemerintah*. Oleh karena itu, masing-masing variabel diukur menggunakan skala likert untuk melihat bobot dari jawaban responden, dengan menggunakan kategori sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dengan rumus sebagai beriku :

$$\text{Nilai Indeks} = ((\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + (\%F3 \times 3) + (\%F4 \times 4) + (\%F5 \times 5)) / 5$$

Keterangan :

F1 adalah frekuensi responden yang menjawab 1

F2 adalah frekuensi responden yang menjawab 2

F3 adalah frekuensi responden yang menjawab 3

F4 adalah frekuensi responden yang menjawab 4

F5 adalah frekuensi responden yang menjawab 5

Total indeks adalah 100 dengan memakai metode tiga kotak dengan membagi jawaban dalam tiga kategori. Jawaban responden memiliki nilai 1-5, sehingga persepsi yang dihasilkan sebagai berikut :

$$\text{Terendah} : (\%F \times 1) / 5 = (100 \times 1) / 5 = 20$$

$$\text{Tertinggi} : (\%F \times 5) / 5 = (100 \times 5) / 5 = 100$$

$$\text{Rentang} : 20 - 100 = 80$$

$$\text{Panjang Kelas Interval} : 80 : 3 = 26,7$$

Maka didapat nilai indeks yang diperoleh dari perhitungan diatas diawali dari angka 20-100 dengan rentang angka senilai 26,7. Dengan panjang kelas interval adalah 100 dibagi 3 bagian, dengan demikian memperoleh rentang masing-masing senilai 26,7 yang dijadikan sebagai interpretasi nilai persepsi dibawah ini :

Kategori :

$$\text{Rendah} = 20 - 46,6$$

$$\text{Sedang} = 46,7 - 73,3$$

$$\text{Tinggi} = 73,4 - 100$$

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut merupakan hasil tanggapan yang diperoleh dari tiap-tiap indikator dari setiap variabel :

4.2.1 Tanggapan Responden Terhadap *Inklusi keuangan* (X2)

Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai variabel *Inklusi Keuangan*, maka dapat dibuat deskripsi variabel yang terdapat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Inklusi Keuangan

No	Pernyataan	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		Nilai Index
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	Ada banyak penyedia layanan keuangan di dekat tempat UMKM kami	3	2,8	5	4,7	11	10,2	48	44,8	40	37,3	81,87
2	Produk pinjaman yang disediakan oleh lembaga keuangan sesuai dengan kebutuhan UMKM kami	3	2,8	4	3,7	16	14,9	41	38,3	43	40,2	81,87
3	Biaya yang dibebankan oleh lembaga keuangan atas penggunaan layanannya terjangkau bagi UMKM kami	6	5,6	6	5,6	16	14,9	41	38,3	38	35,5	78,5
4	Produk/layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan telah meningkatkan pendapatan kami	3	2,8	7	6,5	14	13,0	45	42,1	38	35,5	80,19
						Rata – rata keseluruhan						80,60

Berdasarkan pada Tabel 4.6, dapat dilihat bahwa (mean) rata-rata nilai yang dijawab oleh responden pada variabel *Inklusi keuangan* yaitu sebesar 80,60 yang

termasuk kategori tinggi (73,4 – 100). Dengan demikian menunjukkan bahwa konsumen *UMKM Kutai Timur* memiliki persepsi positif terhadap layanan lembaga keuangan. Sehingga dapat disimpulkan rincian persepsi UMKM berdasarkan masing-masing pertanyaan: (1) **Ketersediaan layanan keuangan:** Mayoritas UMKM (44,8%) menyatakan "setuju" dan (37,3%) menyatakan "sangat setuju" bahwa banyak penyedia layanan keuangan tersedia di dekat lokasi mereka, dengan nilai indeks 81,87. Hal ini menunjukkan aksesibilitas yang baik. (2) **Kesesuaian produk pinjaman:** Sebagian besar UMKM setuju (38,3%) dan sangat setuju (40,2%) bahwa produk pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga keuangan sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan nilai indeks 81,87. (3) **Keterjangkauan biaya:** Persepsi UMKM terhadap biaya layanan juga positif, dengan 38,3% menyatakan setuju dan 35,5% menyatakan sangat setuju bahwa biaya yang dibebankan terjangkau, dengan nilai indeks 78,85. (4) **Dampak terhadap pendapatan:** Layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan dianggap telah meningkatkan pendapatan UMKM, dengan 42,1% responden menyatakan setuju dan 35,5% menyatakan sangat setuju, dengan nilai indeks 80,19. Hal ini menunjukkan bahwa layanan keuangan dianggap sangat membantu. Mayoritas responden menyatakan **aksesibilitas mudah** dengan banyaknya penyedia layanan di dekat lokasi mereka, dan produk pinjaman yang ditawarkan **sesuai dengan kebutuhan**. Selain itu, biaya layanan dianggap **terjangkau** dan penggunaan layanan tersebut terbukti **meningkatkan pendapatan**. Kesimpulan ini menegaskan bahwa inisiatif inklusi keuangan di wilayah Kutai Timur telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM.

4.2.2 Tanggapan Responden Terhadap *Literasi keuangan* (X1)

Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai variabel *Literasi Keuangan*, maka dapat dibuat deskripsi variabel yang terdapat pada tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7 Karakteristik Responden Literasi Keuangan

No	Pernyataan	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		Nilai Index
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	UMKM kami menyadari pentingnya memahami lembaga/perusahaan pemberi pinjaman	3	2,8	3	2,8	15	14,0	57	53,2	29	27,1	79,81
2	UMKM Kami mempunyai kemampuan menganalisis arah perkembangan keuangan perusahaan di masa lalu, sekarang, dan di masa depan.	2	1,9	6	5,6	13	12,1	41	38,3	45	42,1	82,62
3	UMKM kami memiliki pengetahuan akuntansi dasar	2	1,9	5	4,7	13	12,1	39	36,4	48	44,9	83,55
4	Kami memiliki kemampuan untuk menganalisis kinerja keuangan UMKM kami secara berkala	2	1,9	5	4,7	17	15,9	44	41,1	39	36,4	81,12
Rata – rata keseluruhan												81,78

Berdasarkan pada Tabel 4.7 dapat dinilai bahwa (mean) rata-rata yang dijawab oleh responden pada variabel *Literasi Keuangan* yaitu sebesar 81,87 yang termasuk kategori tinggi (73,4 – 100). Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa responden UMKM memiliki tingkat literasi keuangan yang relatif tinggi. Sehingga dapat disimpulkan rincian persepsi UMKM berdasarkan masing-masing pertanyaan: pertama Pentingnya Memahami Lembaga Pemberi Pinjaman: Sebanyak 53,2% responden setuju bahwa UMKM mereka menyadari pentingnya memahami lembaga pemberi pinjaman, dengan 27,1% lainnya sangat setuju. Hal ini

mengindikasikan kesadaran yang kuat di kalangan UMKM tentang pentingnya pengetahuan terkait sumber pendanaan. Nilai indeks untuk aspek ini adalah 79,81.

Kedua kemampuan Menganalisis Perkembangan Keuangan: Mayoritas responden (38,3%) setuju bahwa UMKM mereka memiliki kemampuan untuk menganalisis arah perkembangan keuangan perusahaan di masa lalu, sekarang, dan masa depan, sementara 42,1% menyatakan sangat setuju. Ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki keterampilan dalam menganalisis kondisi keuangan mereka, dengan nilai indeks 82,62. Ketiga pengetahuan Akuntansi Dasar: Sebanyak 36,4% responden setuju dan 44,9% setuju bahwa UMKM mereka memiliki pengetahuan akuntansi dasar. Tingginya persentase ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip akuntansi, yang merupakan fondasi penting dalam mengelola keuangan bisnis. Nilai indeksnya adalah 83,55.

Keempat kemampuan Menganalisis Kinerja Keuangan Secara Berkala: Sebanyak 41,1% responden setuju dan 36,4% sangat setuju bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menganalisis kinerja keuangan UMKM mereka secara berkala. Hal ini mencerminkan praktik yang baik dalam pemantauan kesehatan finansial usaha secara rutin, dengan nilai indeks 81,78. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat literasi keuangan yang baik, khususnya dalam hal pengetahuan akuntansi dasar dan kemampuan menganalisis kinerja keuangan. Temuan ini penting untuk memahami bagaimana UMKM mengelola aspek finansial mereka dan dapat menjadi dasar untuk program pelatihan atau intervensi lebih lanjut guna meningkatkan literasi keuangan yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang baik tentang

pengelolaan keuangan. Mereka menyadari pentingnya memahami lembaga pemberi pinjaman, memiliki kemampuan menganalisis perkembangan dan kinerja keuangan secara berkala, serta memiliki pengetahuan akuntansi dasar yang kuat. Tingginya persentase responden yang setuju dan sangat setuju pada setiap pertanyaan mengindikasikan bahwa pemilik UMKM tidak hanya sadar akan pentingnya literasi keuangan, tetapi juga telah mempraktikkannya dalam operasional bisnis sehari-hari, menjadikannya fondasi yang baik untuk pertumbuhan usaha.

4.2.3 Tanggapan Responden Terhadap *Kinerja UMKM* (Y)

Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai variabel *Kinerja UMKM*, maka dapat dibuat deskripsi variabel yang terdapat pada tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8 Karakteristik Responden Kinerja UMKM

No	Pernyataan	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		Nilai Index
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	Dalam beberapa bulan terakhir ini penjualan UMKM mengalami peningkatan	3	2,8	5	4,7	15	14,0	37	34,6	47	43,7	82,43
2	Dalam beberapa bulan terakhir ini UMKM kami mengalami peningkatan jumlah konsumen	3	2,8	6	5,6	17	15,6	51	47,7	30	28,0	78,50
3	Dalam beberapa bulan terakhir ini UMKM kami mengalami kenaikan laba	2	1,9	7	6,5	13	12,1	46	43,0	39	36,4	81,12
4	Dalam beberapa bulan terakhir ini UMKM kami mengalami perluasan area pasar	3	2,8	8	7,5	12	11,2	48	44,9	36	33,6	79,81

						Rata – rata keseluruhan	80,47
--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------

Berdasarkan pada Tabel 4.8 dapat dinilai bahwa (mean) rata-rata yang dijawab oleh responden pada variable Kinerja UMKM yaitu sebesar 80,47 yang termasuk kategori tinggi (73,4 – 100). Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa kinerja UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik. Sehingga dapat disimpulkan pertama peningkatan penjualan: Sebagian besar responden, yaitu 43,7% , menyatakan sangat setuju (SS) bahwa penjualan UMKM mereka mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Ditambah dengan 34,6% (38 orang) yang menyatakan setuju (S), menunjukkan tren positif yang kuat. Variabel ini memiliki nilai indeks tertinggi, yaitu 82,43.

Kedua peningkatan jumlah konsumen: Sebanyak 47,7% responden menyatakan setuju (S) bahwa jumlah konsumen UMKM mereka meningkat. Lalu 28,0% menyatakan sangat setuju (SS). Variabel ini mendapat nilai indeks 78,50, yang tergolong tinggi. Ketiga kenaikan Laba: Responden yang menyatakan sangat setuju (SS) bahwa laba UMKM mereka naik adalah 36,4%. Sementara itu, 43,0% menyatakan setuju (S). Nilai indeks untuk variabel ini adalah 81,12, menunjukkan bahwa UMKM mengalami peningkatan profitabilitas yang signifikan. Keempat perluasan area pasar: Terdapat 44,9% responden yang setuju (S) dan 33,6% yang sangat setuju (SS) bahwa UMKM mereka mengalami perluasan area pasar. Ini menghasilkan nilai indeks 79,81, yang mengindikasikan upaya UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UMKM secara keseluruhan sangat baik dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Data yang ada menegaskan bahwa para pelaku UMKM berhasil meningkatkan

penjualan, laba, jumlah konsumen, dan jangkauan pasar mereka dalam beberapa bulan terakhir.

4.2.4 Tanggapan Responden Terhadap *Peran Pemerintah (Z)*

Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai variabel *Peran Pemerintah*, maka dapat dibuat deskripsi variabel yang terdapat pada tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9 Karakteristik Responden Peran Pemerintah

No	Pernyataan	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		Nilai Index
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	Peraturan pemerintah yang ada saat ini mendukung pertumbuhan UMKM	4	3,7	3	2,8	8	7,5	47	43,9	45	42,1	85,61
2	Pemerintah secara konsisten menegakkan peraturan yang melindungi dan mendorong UMKM	4	3,7	2	1,9	7	6,5	41	38,3	53	49,5	85,61
3	Program KUR dari pemerintah membantu dalam pengembangan dan pertumbuhan UMKM	3	2,8	5	4,7	13	12,1	44	41,1	42	39,3	81,87
		Rata – rata keseluruhan										83,67

Berdasarkan pada Tabel 4.9 dapat dinilai bahwa (mean) rata-rata yang dijawab oleh responden pada variable *Peran Pemerintah* yaitu sebesar 83,67 yang termasuk kategori tinggi (73,4 – 100). Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mendukung UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) secara keseluruhan sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan pertama peraturan pemerintah: Sebagian besar responden, yaitu 43,9%, menyatakan setuju (S) bahwa peraturan pemerintah saat ini mendukung pertumbuhan UMKM. Ditambah dengan 42,1%

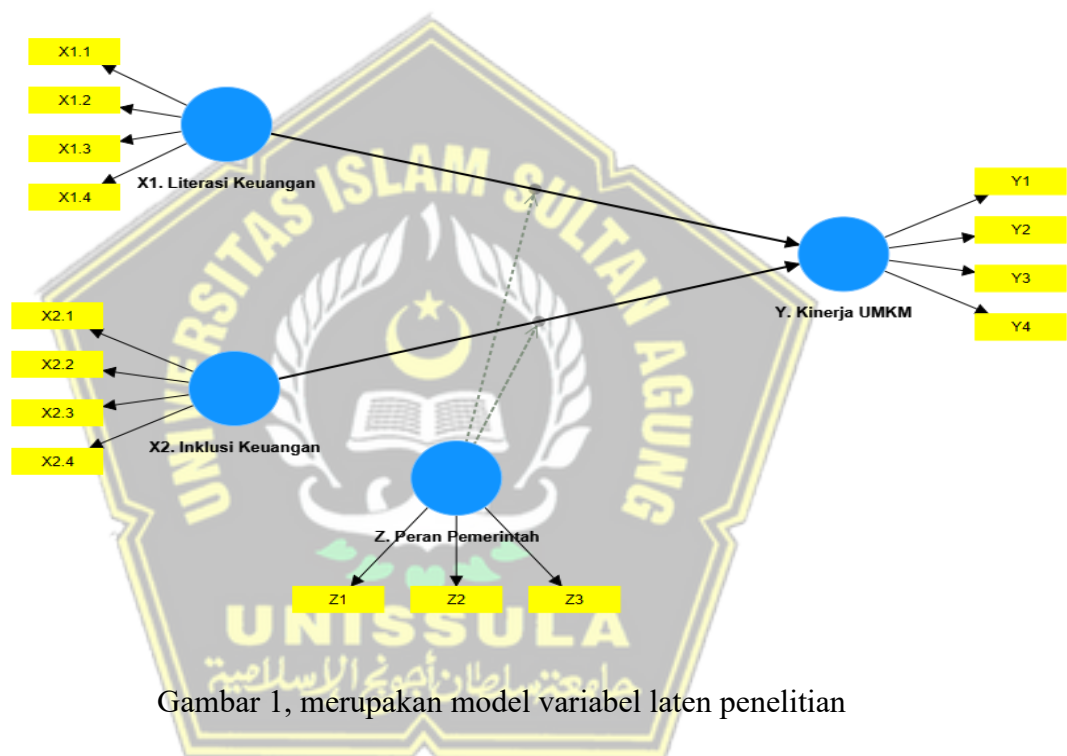
yang menyatakan sangat setuju (SS). Variabel ini memiliki nilai indeks 85,61, yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dinilai positif oleh pelaku UMKM.

Kedua penegakan peraturan: Sebanyak 49,5% responden menyatakan sangat setuju (SS) bahwa pemerintah secara konsisten menegakkan peraturan untuk melindungi dan mendorong UMKM. Lalu, 38,3% menyatakan setuju (S). Variabel ini memiliki nilai indeks tertinggi, yaitu 85,61, yang mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dinilai sangat efektif oleh para responden. Ketiga program KUR: Responden yang menyatakan setuju (S) bahwa program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari pemerintah membantu pengembangan UMKM adalah 41,1%. Sementara itu, 39,3% menyatakan sangat setuju (SS). Variabel ini mendapatkan nilai indeks 81,87, menunjukkan bahwa program pembiayaan seperti KUR dianggap sangat bermanfaat bagi pertumbuhan UMKM

Secara keseluruhan, data pada Tabel 4.9 menunjukkan persepsi yang sangat positif dari pelaku UMKM terhadap peran pemerintah. Ketiga aspek utama, yaitu peraturan, penegakan peraturan, dan program KUR, semuanya menunjukkan dukungan yang kuat dari pemerintah, dengan nilai indeks di atas 80 untuk setiap variabel. Rata-rata indeks keseluruhan sebesar 83,67 memperkuat kesimpulan bahwa peran pemerintah dinilai efektif dan sangat membantu dalam mendukung pertumbuhan UMKM. kesimpulanya peran pemerintah dalam mendukung UMKM dinilai sangat positif oleh responden, hal ini menempatkan dukungan pemerintah pada kategori tinggi. Tiga aspek utama, yaitu peraturan yang mendukung, penegakan peraturan yang konsisten, dan program pembiayaan seperti KUR, semuanya mendapatkan persepsi yang kuat dan positif. Regulasi dan penagakannya, sementara program KUR juga dianggap sangat bermanfaat. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM merasa didukung secara efektif oleh kebijakan dan program pemerintah, yang berkontribusi signifikan pada pertumbuhan dan pengembangan usaha mereka.

4.3 Analisis Data

Model pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode partial square (PLS) yang didukung oleh software SmartPLS versi 4, yang menerapkan metode Partial Least Squares (PLS) dan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varians. PLS merupakan Teknik yang digunakan untuk menganalisa hubungan antar variable dalam model yang kompleks, sementara SEM digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel yang terlibat. Gambar 1, merupakan model variabel laten yang akan dianalisis dalam penelitian.



Gambar 1, merupakan model variabel laten penelitian

Terdapat 2 tahapan yang dilakukan dalam pengujian model penelitian yaitu Outer Model dan Inner Model. **Outer Model** berfokus pada validitas dan realibilitas indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten, dengan pengujian Convergent Validity, Discriminant Validity, dan Construct realibility. Inner Model berfokus pada hubungan antar variabel laten dan pengujian kekuatan serta signifikansi hubungan tersebut, dengan pengujian R^2 , Koefisien jalur, dan signifikansi jalur.

4.3.1 Outer Model

Outer Model berfokus pada hubungan antar variabel laten indikator. Pengujian pada outer model bertujuan untuk memastikan bahwa instrument yang digunakan untuk mengukur variabel laten memiliki validitas dan realibilitas yang baik. Ada tiga jenis pengujian utama dalam outer model yaitu Convergent Validity, Discriminant validity, dan Construct Validity.

a. Convergent Validity

Convergent Validity memiliki dua kriteria nilai yang dapat dievaluasi, yaitu menggunakan nilai *loading factor* atau nilai *Average Variance Extracted (AVE)*.

1. Nilai Loading Factor

Output hasil estimasi outer loading diukur dari korelasi antar skor indikator (instrument) dengan konstrucknya (variabel). Indikator dianggap valid jika memiliki nilai korelasi diatas 0,70 atau 0,60 sudah dianggap cukup. Apabila ada indikator yang tidak memenuhi syarat ini maka harus dibuang. Hasil *convergent validity* ada dalam penelitian pada tabel 4.10.

Tabel 4.10. Hasil Outer Loading Uji *Convergent Validity*

Instrument	Literasi Keuangan (X1)	Inklusi Keuangan (X2)	Kinerja UMKM (Y)	Peran Pemerintah (Z)	Ket.
X1.1	0.731				Valid
X1.2	0.828				Valid
X1.3	0.814				Valid
X1.4	0.778				Valid
X2.1		0.810			Valid
X2.2		0.824			Valid
X2.3		0.871			Valid
X2.4		0.862			Valid
Y1			0.836		Valid
Y2			0.811		Valid

Y3			0.851		Valid
Y4			0.841		Valid
Z1				0.820	Valid
Z2				0.873	Valid
Z3				0.832	Valid

Berdasarkan hasil outer loading diatas semua pernyataan variabel Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Kinerja UMKM dan Peran Pemerintah memiliki nilai $> 0,7$ sehingga semua dikatakan valid. Hal ini mengindikasikan bahwa indicator/pernyataan yang digunakan berhasil mengukur korelasi antara skor indicator/pernyataan dengan konstraknya/variabel, sehingga mendukung validitas konstruk model pengukuran. *Average Variance Extracted (AVE)*

Output hasil estimasi average variance extracted (AVE) dapat dilihat pada tabel 4.12. variabel dikatakan valid jika memiliki *average variance extracted (AVE)* $> 0,5$.

Tabel 4.11. Hasil AVE Uji Convergent Validity

Variabel	Average Variance Extracted	Keterangan
Literasi Keuangan (X1)	0.622	Valid
Inklusi Keuangan (X2)	0.709	Valid
Kinerja UMKM (Y)	0.697	Valid
Peran Pemerintah (Z)	0.709	Valid

Nilai AVE masing masing variabel adalah Literasi Keuangan sebesar 0,622 Inklusi Keuangan 0,709 Kinerja UMKM 0,697, dan Peran Pemerintah sebesar 0,709. Keempat variabel ini memiliki nilai $> 0,50$, artinya keempat variabel tersebut dikategorikan sebagai valid. Secara keseluruhan, keempat variabel dalam penelitian, yaitu *Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Kinerja UMKM, dan Peran Pemerintah*, memiliki nilai AVE di atas ambang batas yang ditentukan ($> 0,5$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **semua variabel ini memiliki validitas**

konvergen yang baik, artinya instrumen pengukuran (kuesioner) yang digunakan sudah tepat untuk mengukur masing-masing variabel tersebut.

b. Discriminant Validity

Discriminant validity digunakan untuk memastikan bahwa konstruk atau variabel dalam model pengukuran benar-benar mengukur hal yang berbeda atau tidak tumpang tindih satu sama lain. Dengan kata lain, *discriminant validity* mengukur sejauh mana konstruk yang berbeda dalam model pengukuran dapat digunakan satu sama lain. *Discriminant validity* yang digunakan disini adalah *cross loading*. Indikator/ Pernyataan dinyatakan valid jika hubungan indikator/ pernyataan dengan konstruknya/ variabel (nilai cross loading) lebih tinggi dibandingkan dengan hubungannya dengan konstruk/ variabel yang lain. Berikut ini hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS versi 4 dengan hasil *Cross Loading* sebagai mana tabel dibawah ini.

Tabel 4.11. Hasil Cross Loading

Instrument	Literasi Keuangan (X1)	Inklusi Keuangan (X2)	Kinerja UMKM (Y)	Peran Pemerintah (Z)	Ket.
X1.1	0.731	0.538	0.491	0.009	Valid
X1.2	0.828	0.493	0.601	0.092	Valid
X1.3	0.814	0.464	0.608	0.126	Valid
X1.4	0.778	0.426	0.514	0.069	Valid
X2.1	0.469	0.810	0.539	0.319	Valid
X2.2	0.515	0.824	0.599	0.320	Valid
X2.3	0.529	0.871	0.597	0.427	Valid
X2.4	0.526	0.862	0.601	0.377	Valid
Y1	0.616	0.532	0.836	0.341	Valid
Y2	0.589	0.595	0.811	0.310	Valid
Y3	0.582	0.634	0.851	0.284	Valid
Y4	0.568	0.554	0.841	0.312	Valid
Z1	0.043	0.361	0.268	0.820	Valid
Z2	0.159	0.407	0.340	0.873	Valid
Z3	0.036	0.317	0.328	0.832	Valid

Nilai Cross Loading untuk variabel Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Kinerja UMKM, dan Peran Pemerintah memiliki nilai korelasi antara indikator (instrument) dengan konstruknya (variabel) > indikator (instrument) pada konstruk (variabel) lainnya. Hasil uji convergent validity dan discriminant validity menunjukkan angka yang konsisten dengan semua indikator dinyatakan valid. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang digunakan memiliki kecocokan yang baik dan mampu membedakan antara konstruk yang berbeda secara efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

c. Construct Reliability

Construct Reliability dapat dianalisis menggunakan salah satu dari dua cara ini, yaitu dengan menganalisis nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Kedua cara ini merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada satu variabel.

1. Cronbach's Alpha

Cronbach's alpha Adalah indikator penting dalam menguji reliabilitas variabel dalam model PLS-SEM. Nilai *Cronbach's Alpha* yang tinggi menunjukkan bahwa konstruk/variabel tersebut diukur dengan baik dan konsisten untuk validitas pengukuran dalam analisis PLS. Sebaliknya jika nilai Cronbach's Alpha rendah, ini dapat mengindikasikan bahwa indikator/ Pernyataan yang digunakan tidak cukup reliabel dan perlu diperbaiki atau diganti.

Tabel 4.12. Hasil Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Literasi Keuangan (X1)	0.797	Reliabel
Inklusi Keuangan (X2)	0.863	Reliabel
Kinerja UMKM (Y)	0.855	Reliabel
Peran Pemerintah (Z)	0.796	Reliabel

Hasil analisis pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk konstruk/variabel Literasi Keuangan sebesar 0,797, Inklusi Keuangan sebesar 0,863, Kinerja UMKM sebesar 0,855 dan variabel Peran Pemerintah sebesar 0,796. Semua nilai Cronbach's Alpha tersebut berada \geq 0,70. Sehingga semua variabel memiliki reliabilitas yang baik.

2. Composite Reliability

Composite Reliability digunakan untuk memastikan konsistensi internal dari indikator-indikator yang membentuk variabel laten. Dalam SmartPLS, Composite Reliability Adalah alat utama untuk mengukur reliabilitas, dan nilai CR \geq 0,7 dianggap memenuhi standar untuk penelitian.

Tabel 4.13. Hasil Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Literasi Keuangan (X1)	0.868	Reliabel
Inklusi Keuangan (X2)	0.907	Reliabel
Kinerja UMKM (Y)	0.902	Reliabel
Peran Pemerintah (Z)	0.880	Reliabel

Hasilnya analisis ini menunjukkan bahwa nilai Composite reliability untuk konstruk/variabel Literasi keuangan sebesar 0,868, Inklusi Keuangan sebesar 0,907, Kinerja UMKM sebesar 0,902, dan Peran Pemerintah sebesar

0,880. Semua nilai Composite reliability tersebut $\geq 0,70$, sehingga semua variabel memiliki reliabilitas yang baik.

4.3.2 Inner Model

Inner model dalam PLS-SEM menggambarkan hubungan antar variabel laten dan dievaluasi untuk melihat kekuatan serta signifikansi hubungan tersebut. Evaluasinya mencakup tiga aspek utama : Signifikansi hubungan (pengujian hipotesis), R Square dan Effect Size.

a. R Square (R^2)

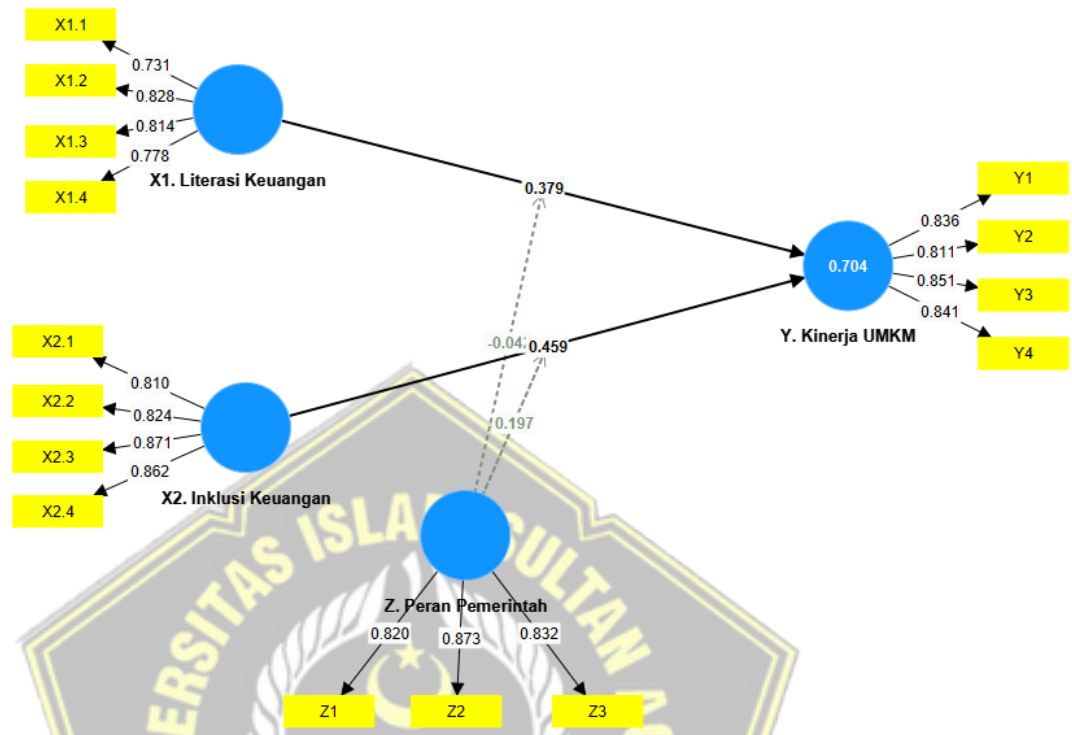
R – Square dalam PLS-SEM mengukur seberapa baik variabel independen laten dalam model dapat menjelaskan validitas variabel dependen laten. Nilai R^2 menunjukkan kekuatan prediktif model secara keseluruhan. Nilai R^2 berkisar dari 0 hingga 1, Nilai R Square 0,75 dapat disimpulkan model yang kuat, 0,50 dapat disimpulkan model yang sedang atau moderat, dan 0,25 dapat disimpulkan model yang lemah. Berikut nilai R-Square dalam analisis ini.

Tabel 4.14. Hasil Uji R Square (R^2)

Varians Dependen	R - Square	R – Square adjust
Kinerja Keuangan	0.704	0.690

Berdasarkan hasil analisis diperoleh Nilai R-Square sebesar 0,704 untuk variabel Kinerja Keuangan menunjukkan bahwa 70% variasi pada variabel ini dapat dijelaskan oleh variabel independent dalam model, sisanya 30% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model, sehingga hubungan antar variabel independent dengan

Kinerja keuangan sedang atau moderat. Berikut gambar 2 output PLS SEM Algorithm untuk melihat R^2 model penelitian.



b. Effect Size (F^2)

Effect size (F^2) digunakan untuk mengevaluasi dampak spesifik variabel independent terhadap prediksi variabel dependen. Pengukuran ini dilakukan dengan melihat perubahan nilai R^2 setelah variabel independent tertentu dihilangkan dari model. Nilai F^2 diinterpretasikan sebagai berikut : $F^2 \leq 0,02$ (sangat kecil), $0,02 \leq F^2 < 0,15$ (efek kecil), $0,15 \leq F^2 < 0,35$ (efek sedang), $F^2 \geq 0,35$ (efek besar). Dengan menghitung F^2 , peneliti dapat mengidentifikasi variabel independent mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel dependen dalam model, sehingga memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika hubungan antar variabel laten.

Tabel 4.15. Hasil Uji Effect Size (F^2)

Variabel	Literasi Keuangan (X1)	Inklusi Keuangan (X2)	Kinerja UMKM (Y)	Peran Pemerintah (Z)
X1. Literasi Keuangan			0.235	
X2. Inklusi Keuangan			0.256	
Y Kinerja UMKM				
Z. Peran Pemerintah			0.222	
Z. Peran Pemerintah x X1. Literasi Keuangan			0.010	
Z. Peran Pemerintah x X2. Inklusi Keuangan			0.217	

Berdasarkan hasil tabel 4.15 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM

Nilai $F^2 = 0,235$, termasuk kategori efek sedang, ini menunjukkan bahwa Literasi keuangan cukup berpengaruh terhadap Kinerja UMKM.

2. Inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM

Nilai $F^2 = 0,256$, termasuk kategori efek sedang, ini menunjukkan bahwa Literasi keuangan cukup berpengaruh terhadap Kinerja UMKM.

3. Peran Pemerintah terhadap Kinerja UMKM

Nilai $F^2 = 0,222$, termasuk kategori efek sedang, ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah cukup berpengaruh terhadap Kinerja UMKM.

4. Peran Pemerintah x Literasi keuangan terhadap kinerja UMKM

Nilai $F^2 = 0,010$ menunjukkan bahwa interaksi antara Peran Pemerintah memoderasi Literasi Keuangan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap Kinerja UMKM.

5. Peran Pemerintah x Inklusi keuangan terhadap Kinerja UMKM

Nilai $F^2 = 0,217$ menunjukkan bahwa interaksi antara Peran Pemerintah memoderasi Inklusi Keuangan cukup memberikan kontribusi signifikan terhadap Kinerja UMKM.

c. Path Coefficients (Pengujian Hipotesis)

Uji signifikansi hubungan dalam PLS-SEM dilakukan untuk menentukan apakah hubungan antar variabel laten dalam model dapat dianggap signifikan secara statistik. Proses ini menggunakan Teknik bootstrapping, dimana data di-resampling untuk menghitung nilai koefisien jalur (path coefficient) dan kesalahan standarnya. Hasilnya dalam bentuk nilai t-statistic atau p-value, sebuah hubungan dianggap signifikan jika p-value lebih kecil dari Tingkat signifikansi yang telah ditentukan (dalam penelitian ini menggunakan signifikansi 0,05), koefisien jalur yang signifikan menunjukkan bahwa hubungan antar variabel independent dan dependent laten memiliki dukungan statistik yang kuat, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hasil bootstrapping efek langsung (direct effect) dapat dilihat pada tabel 4.15. sebagai berikut :

Tabel 4.15.
Uji Hipotesis

Konstruk	<i>Original Sample</i>	T Statistik	P Value	Keterangan
Literasi keuangan -> Kinerja UMKM	0.379	3.758	0.000	Diterima
Inklusi keuangan -> Kinerja UMKM	0.459	3.630	0.000	Diterima
Peran Pemerintah -> Kinerja UMKM	0.380	2.254	0.024	
Peran Pemerintah x Literasi keuangan -> Kinerja UMKM	-0.042	0.429	0.668	Ditolak
Peran Pemerintah x Inklusi keuangan -> Kinerja UMKM	0.197	2.272	0.023	Diterima

Hasil pengujian menggunakan analisis PLS metode bootstrapping dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM menunjukkan nilai original sample sebesar 0,379 (positif) dan nilai p value sebesar $0.000 < 0.05$. Ini artinya Literasi Keuangan berdampak positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM. Hal ini dimaknai semakin bagus *Literasi keuangan* maka akan dapat meningkatkan secara signifikan Kinerja UMKM. Dengan demikian **Hipotesis pertama diterima**
2. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM menunjukkan nilai original sample sebesar 0,459 (positif) dan nilai p value sebesar $0,000 < 0,05$. Ini artinya Inklusi Keuangan berdampak positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM. Hal ini dimaknai semakin bagus *Inklusi keuangan* maka akan dapat meningkatkan secara signifikan Kinerja UMKM. Dengan demikian **Hipotesis kedua diterima**
3. Pengaruh Peran pemerintah dalam memoderasi pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM menunjukkan nilai original sample sebesar -0,042(negatif) dan nilai p value sebesar $0.668 > 0.05$. Ini mengandung arti bahwa Peran pemerintah belum mampu meningkatkan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM. Dengan demikian **hipotesis ketiga** yang diajukan dalam penelitian ini, **tidak dapat diterima**
4. Pengaruh Peran pemerintah dalam memoderasi pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM menunjukkan nilai original sample sebesar 0,197(positif) dan nilai p value sebesar $0.023 < 0.05$. Ini mengandung arti bahwa Peran pemerintah mampu meningkatkan Inklusi Keuangan terhadap

Kinerja UMKM. Dengan demikian **hipotesis keempat** yang diajukan dalam penelitian ini, **dapat diterima**

5. Pengaruh Peran pemerintah terhadap Kinerja UMKM menunjukkan nilai original sample sebesar 0,380 (positif) dan nilai p value sebesar sebesar $0,024 < 0,05$. Ini artinya peran pemerintah berdampak positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM. Hal ini dimaknai semakin bagus *peran pemerintah* maka akan dapat meningkatkan secara signifikan Kinerja UMKM.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM dengan nilai *p-value* 0.000 atau $0.000 < 0.05$, sehingga hipotesis H_1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mutiara, 2023) dan (Sanistasya, 2019) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Ini berarti bahwa kinerja UMKM akan meningkat seiring dengan peningkatan literasi keuangan. Penelitian ini juga didukung oleh Amin (Amin, 2023) yang menyatakan bahwa literasi keuangan yang baik akan mendukung pola pikir pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis. Artinya, semakin tinggi pengetahuan keuangan yang dimiliki, semakin baik pula usaha tersebut dijalankan.

Literasi keuangan mencakup kemampuan melakukan perhitungan dan mengambil keputusan investasi yang tepat, serta mengelola keuangan pribadi

secara efektif. Hal ini tidak hanya melibatkan pengetahuan tentang konsep-konsep di bidang keuangan, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan mengomunikasikan konsep-konsep tersebut. Selain itu, literasi keuangan juga mencakup kecakapan dalam mengelola keuangan baik pribadi maupun perusahaan, serta kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang bijaksana dalam berbagai situasi dan kondisi. Jadi, literasi keuangan bersifat komprehensif, mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta kebijaksanaan dalam menerapkan semua hal tersebut dalam pengelolaan keuangan (Aribawa, 2016). Dengan literasi keuangan yang baik, pelaku UMKM dapat mengelola keuangan bisnis mereka secara lebih efisien dan mengurangi risiko finansial, yang secara langsung berdampak positif pada peningkatan kinerja UMKM. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kinerja UMKM dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan yang dimiliki.

4.4.2 Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Inklusi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM dengan nilai p-value $0.000 < 0.05$, sehingga hipotesis H2 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Cipta (2022) bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Penelitian oleh Mali (2023) juga menemukan bahwa inklusi keuangan mempermudah akses keuangan UMKM sehingga UMKM dengan mudah mendapatkan modal usaha untuk memaksimalkan kinerja usaha.

Inklusi keuangan merupakan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inklusi keuangan mengacu pada akses yang luas terhadap layanan keuangan formal bagi seluruh masyarakat, termasuk UMKM. Dengan memiliki tingkat inklusi keuangan yang baik akan membuka jalan bagi UMKM untuk mengakses ketersediaan layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan berdampak pada peningkatan kinerja UMKM (Yanti, 2019). Inklusi keuangan dapat diandalkan dalam mendorong peningkatan kinerja UMKM. Salah satu dampak yang diberikan inklusi keuangan yaitu memberikan akses yang baik pada pembiayaan bagi UMKM. Dengan begitu, hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja UMKM. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Wulandari, 2019) yang menyatakan bahwa kemudahan akses keuangan dapat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kinerja usaha mereka, yang mana akan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan para pelaku UMKM.

4.4.3 Peran Pemerintah dalam memoderasi Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM

Peran pemerintah dalam memoderasi Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM menunjukkan nilai $-0,042$ (negatif) dan nilai p value sebesar $0.668 > 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Peran pemerintah belum mampu meningkatkan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hal ini bisa terjadi karena dua alasan. Pertama Program-program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan mungkin tidak tepat sasaran atau tidak efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM. Misalnya, pelatihan yang diberikan mungkin tidak relevan dengan kebutuhan UMKM atau tidak diimplementasikan dengan baik, dan kedua Konteks lokal atau regional di

Kabupaten Kutai Timur khususnya tempat saya mengambil sampel yaitu kecamatan kongbeng dan muara wahau yang jaraknya 4 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor mempengaruhi bagaimana peran pemerintah berinteraksi dengan pelaku UMKM.

4.4.4 Peran pemerintah dalam memoderasi Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM

Peran pemerintah dalam memoderasi Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM menunjukkan nilai 0,197(positif) dan p value sebesar $0.023 < 0.05$. Ini mengandung arti bahwa Peran pemerintah mampu meningkatkan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM, sehingga hipotesis H4 diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wilfarda, 2021) yang menyatakan peran pemerintah dapat memoderasi inklusi keuangan dalam kinerja UMKM. Peran oleh pemerintah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan UMKM tersebut karena UMKM tersebut memainkan peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah biasanya memberikan dukungan yang sangat penting bagi pelaku UMKM yang termasuk insentif, pembiayaan dengan suku bunga rendah, pelatihan dan Pendidikan, akses pasar, serta infrastruktur yang memadai bagi pelaku UMKM tersebut (Wilfarda, 2021).

Inklusi keuangan sangat penting untuk keberlangsungan UMKM karena membuka akses terhadap layanan keuangan yang diperlukan untuk pengembangan dan pertumbuhan bisnis ini, dalam bisnis ini mencakup pembiayaan, layanan perbankan, asuransi, dan pendidikan keuangan (Whella,

2021). Dengan inklusi keuangan yang sangat kuat, maka UMKM dapat meningkatkan produktifitas, memperluas pasar, dan meningkatkan ketahanan ekonomi pada pelaku UMKM tersebut. Namun tantangan yang mereka hadapi adalah seperti kurangnya akses pengetahuan, dan infrastruktur yang masih sangat perlu diperhatikan untuk mencapai inklusi keuangan yang menyeluruh bagi seluruh pelaku UMKM (Utomo, 2024).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas tersebut, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM. Semakin bagus *Literasi keuangan* maka akan dapat meningkatkan secara signifikan Kinerja UMKM.
2. Inklusi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM. Semakin bagus *Inklusi keuangan* maka akan dapat meningkatkan secara signifikan Kinerja UMKM
3. Peran pemerintah belum mampu meningkatkan pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM. Literasi Keuangan dapat meningkatkan Kinerja UMKM, namun peningkatan ini bukan karena peran pemerintah
4. Peran pemerintah mampu meningkatkan pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM. Inklusi Keuangan dapat meningkatkan Kinerja UMKM, dan peningkatan ini didukung adanya peran pemerintah

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain agar penelitian ini akan semakin berkembang. Selain itu penulis mengharapkan para akademisi juga turut serta dalam mendorong para kelompok UMKM dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan yang masih rendah serta membantu dalam praktek tata kelola keuangan agar menambah pengetahuan para pemilik usaha kecil agar lebih tertata di dalam laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki omset para pelaku bisnis.

2. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap pemerintah sadar terhadap rendahnya tingkat literasi UMKM. Tugas ini memerlukan peranan penting pemerintah dalam keberlangsungan dan perkembangan literasi keuangan agar masyarakat luas bukan hanya mengetahui berbagai jasa keuangan tetapi juga memahami, terampil dan memiliki keyakinan dalam pengambilan keputusan dalam mengelola keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan. Contohnya dalam studi ini masih kurangnya pengetahuan pelaku bisnis usaha mikro yang memahami manfaat dan fasilitas yang diberikan oleh layanan jasa keuangan dalam mengembangkan UMKM. Selain itu faktor kurangnya pembinaan dalam dalam setiap UMKM yang ada merupakan salah satu faktor masih rendahnya tingkat literasi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Y. M., Rachmawari, L., & Ilmi, M. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI, MOTIVASI INVESTASI, LITERASI PASAR MODAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP PENINGKATAN MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL. *Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 8.
- Anggreani, W. C., ningtiyas, W. P., & Alimah, N. M. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Governement and Politics*, 3.
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/5354/3204>
- Arianti, B. F. (2022). LITERASI KEUANGAN (TEORI DAN IMPLEMENTASINYA) BAIQ FITRI ARIANTI PENERBIT CV. PENA PERSADA. In *Book*. Pena persada.
- Aribawa, D. (2016). Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20(1), 1–13.
<https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss1.art1>
- Arrezqi, M., setyadi, D., Nahar, M., Sugiyanta, & Widyanti, D. (2024). PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM SEMARANG KULINER (RANGKUL). *Ilmiah Indonesia*, 9.
- Arwan, A. (2018). PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA (Studi pada Program Kredit Usaha Rakyat Periode Tahun. In *Thesis*. UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- Azizah, N. S. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan, gaya Hidup padaPrilaku keuangan pada generasi milenial. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*.
- Chaidir, T., Suprpti, I. A. P., Arini, G. A., & Ismiwati, B. (2020). Determinan Literasi Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 1–19.
<https://doi.org/10.29303/e-jep.v2i1.15>
- Cristanti, I. L., Luhsasi, D. I., & Sitorus, D. S. (2021). Pandemi Covid-19: Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Mental Accounting Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa FKIP UKSW. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 128.
<https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2690>
- Desmaryani, S. (2018). Wirausaha dan Daya Saing. In *Book*. Deepublish Publisher.
- Fitria, I., Soejono, F., & Tyra, M. J. (2021). Literasi keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan dan kinerja UMKM. *Journal of Business and Banking*, 11 Number 1. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2496>
- Heliani, & Novitasari, S. A. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi keuangan dan Finansial teknologi terhadap KinerjaUMKM di Kota Sukabumi. *Jurnal Aktiva*, 6.
- Hendrawan, A., & Wijaya, A. (2020). Pengaruh Dimensi Orientasi Kewirausahaan dan Jaringan Usaha terhadap Kinerja Usaha UKM di Jakarta Barat. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 2(3), 577. <https://doi.org/10.24912/jmk.v2i3.9569>

- Herlyansyah, B. (2021). PERAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK). *Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id*.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/31469/25631>
- Hertadiani, V. W., & Lestari, D. (2021). PENGARUH INKLUSI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM SEKTOR KULINER DI JAKARTA TIMUR. *Kalbisco, Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 8.
<http://ojs.kalbis.ac.id/index.php/kalbisocio/article/view/173/111>
- Hilmawati, M. R. N., & Kusumaningtias, R. (2021). INKLUSI KEUANGAN DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA DAN KEBERLANGSUNGAN SEKTOR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH. *Https://Journal.Uny.Ac.Id*, 10(1).
- Holle, M. H. (2020). INKLUSI KEUANGAN; SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN GUNA DAYA SAING PEREKONOMIAN BANGSA. *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 01(02).
- Humaira, Q. (2020). ANALISIS PERAN PEREMPUAN DAN PEMERINTAH DALAM PERKEMBANGAN UMKM DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Universitas Islam Negeri AR - RANIRY Banda Aceh*.
- Junaidi, M. (2023, July 15). *UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat*.
<https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id>.
- Khuc, T. A., Do, H. L., & Pham, B. L. (2022). FACTORS INFLUENCING FINANCIAL LITERACY OF THE POOR IN RURAL AREAS: EMPIRICAL RESEARCH WITH THE CASE OF VIETNAM. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 9(4), 638–650. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i4.735>
- Kilay, A. L., Simamora, B. H., & Putra, D. P. (2022). The Influence of E-Payment and E-Commerce Services on Supply Chain Performance: Implications of Open Innovation and Solutions for the Digitalization of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3). <https://doi.org/10.3390/joitmc8030119>
- Krismalinda, A. (2022). *KINERJA UMKM DALAM PERSPEKTIF FINANCIAL LITERACY DAN FINANCIAL INCLUSION YANG DIMODERASI OLEH RISK TAKING*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Kusuma, melia, Narulitasari, D., & Nurohman, A. (2021). INKLUSI KEUANGAN DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA DAN KEBERLANJUTAN UMKM DI SOLO RAYA. *Jurnal Among Makarti*, 14.
- Lestari. (2024, March 20). *Hubungan yang Kuat antara Sektor Industri dan UMKM Harus segera Diwujudkan* Artikel ini telah tayang di *Tribunnews.com* dengan judul *Rerie: Hubungan yang Kuat antara Sektor Industri dan UMKM Harus segera Diwujudkan*, <https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2024/03/20/rerie-hubungan-yang-kuat-antara-sektor-industri-dan-umkm-harus-segera-diwujudkan>. Editor: Content Writer. <https://Www.Tribunnews.Com>.

- Lodico, M. G., Spaulding, D. T., & Voegtler, K. (2017). Methods in Educational Research from Theory to Practice. In *Book* (second). Jossey Bass.
- Lusardi Olivia Mitchell, A. S., Bucher-Koenen, T., Currie, J., van Rooij for suggestions, M., de Bassa Scheresberg, C., Kim, H., St Louis, D., Yu, Y., Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2013). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *National Bureau of Economic Research*.
<http://www.nber.org/papers/w18952>
- Maharani, S. (2022). *PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO DI DESA BAKTISERAGA KECAMATAN BULELENG*.
- Mali, M. S. (2023). Pengaruh Inklusi Keuangan, Pengelolaan Keuangan, terhadap Kinerja UMKM Sektor Kuliner di Kota Yogyakarta. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 291. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.985>
- Mukoffi, A., & As'adi, ; (2021). Karakteristik wirausaha, modal usaha dan kecanggihan teknologi terhadap kinerja UMKM di masa pandemi Covid-19. In *Jurnal Paradigma Ekonomika* (Vol. 16, Issue 2).
- Mutegi, H. K., Njeru, P. W., & Ongesa, N. T. (2015). FINANCIAL LITERACY AND ITS IMPACT ON LOAN REPAYMENT BY SMALL AND MEDIUM ENTERPRENUERS AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF BOOK KEEPING SKILLS FROM EQUITY GROUP FOUNDATION'S FINANCIAL LITERACY TRAINING PROGRAM ON ENTREPRENEURS' LOAN REPAYMENT PERFORMACE. In *International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom: Vol. III*. <http://ijecm.co.uk/>
- Mutiara. (2023). *PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP KEPUTUSAN BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN QRIS PADA MAHASISWA UIN RADEN FATAH PALEMBANG* [Universitas Islam Negeri Raden Fatah palembang]. <https://repository.radenfatah.ac.id/28987/>
- Naufal, M. I., & Purwanto, E. (2022). Dampak literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 16 No 2. <https://profit.ub.ac.id>
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, & Hasanuddin, M. (2017). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN ENREKANG. *Jurnal Administrasi Publik*, 3.
<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- Nugraha, D. P., Setiawan, B., Nathan, R. J., & Fekete-Farkas, M. (2022). Fintech Adoption Drivers for Innovation for SMEs in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(4).
<https://doi.org/10.3390/joitmc8040208>
- Nurhadianthy, H. A., & Anis, B. J. (2023). Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Menggunakan Balanced Scorecard. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 4(01), 1–14. <https://doi.org/10.37366/ekomabis.v4i01.14>
- Nurhayadi, W., Aulia, U., & Cahyadi, R. A. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.

https://www.researchgate.net/publication/388696769_Pengaruh_Literasi_Keuangan_dan_Inklusi_Keuangan_terhadap_Kinerja_UMKM_di_Kota_Serang/link/67a30cf6207c0c20fa78bdc5/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

Obaji, N. O. (2014). The Role of Government Policy in Entrepreneurship Development. *Science Journal of Business and Management*, 2(4), 109.
<https://doi.org/10.11648/j.sjbm.20140204.12>

OJK, & Badan Pusat Statistik. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. <https://www.Ojk.Go.Id>. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-\(SNLIK\)-2024](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-(SNLIK)-2024)

Pradipta, Y. B., & Kristianto, R. H. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM Kuliner Kota Yogyakarta. *Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(6). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i6>

Purwidiyanti, W., & Tubastuvi, N. (2019). The Effect of Financial Literacy and Financial Experience on SME Financial Behavior in Indonesia. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 10(1), 40–45. <https://doi.org/10.15294/jdm.v10i1.16937>

Pusparani, A. (2019). *Analisis Pengaruh Financial Literacy dan Financial Attitude terhadap Financial Behavior pada Siswa/i Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandung*. TELKOM UNIVERSITY.

Rahardjo, B., Ikhwan, K., & Siharis, A. K. (2019). PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KOTA MAGELANG. *Prosiding SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS*.

Rahmah, I., Kaukab, M. E., & Yuwono, W. (2020). PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM. *JURNAL CAPITAL : Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 30–50.
<https://doi.org/10.33747/capital.v3i2.39>

Rani, G. M., & Desiyanti, R. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Digital Payment Terhadap Kinerja UMKM Makanan & Minuman di Kota Padang. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 5(02), 161–174.
<https://doi.org/10.37366/ekomabis.v5i02.1403>

Sanistasya, P. A., Rahardjo, K., & Iqbal, M. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur. In *Jurnal Economia* (Vol. 14, Issue 1). <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia>

Saphira, A. (2024). PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MEMODERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM DI KOTA SEMARANG. In *Tesis* (Vol. 15, Issue 1). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sari, F. A. P., & Farida, N. (2020). PENGARUH ORIENTASI PASAR DAN ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KINERJA PEMASARAN MELALUI INOVASI PRODUK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada UMKM Kuningan Juwana Kabupaten Pati). *Jurnal Administrasi Bisnis*, X, 345.

- Septiani, R. N., & Wuryani, E. (2020). PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM DI SIDOARJO. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(8), 3214.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i08.p16>
- Sholeh, B. (2019). PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI UNIVERSITAS PAMULANG. *Pekobis : Jurnal Pendidikan, Ekonomi, Dan Bisnis*, 4(2), 57. <https://doi.org/10.32493/pekobis.v4i2.p57-67.4306>
- Silaen, S. (2018). Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. In *Buku*. In Media.
- Soetiono, K. S., & Setiawan, C. (2018). LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN INDONESIA. In *Buku* (1st ed., Vol. 2018). PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Book*. Alfabeta.
- Utami, E. N., & Mulyaningsih, H. D. (2016). PENGARUH KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KINERJA UMKM. *Bisnis Dan Iptek*, 9(2), 98–109.
- Utomo, S. B., Pujowati, Y., & Utami, E. Y. (2024). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Sektor Kuliner di Jakarta Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 2. <https://pdfs.semanticscholar.org/60f3/5382cda6a5a126d16d528f561a17b369ebe7.pdf>
- Wahyono, & Hutahayan, B. (2021). The relationships between market orientation, learning orientation, financial literacy, on the knowledge competence, innovation, and performance of small and medium textile industries in Java and Bali. *Asia Pacific Management Review*, 26(1), 39–46.
<https://doi.org/10.1016/j.apmr.2020.07.001>
- Wahyudiati, D. (2017). PENGARUH ASPEK KEUANGAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA KASONGAN. In *Thesis*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wulandari, R. (2019). PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM (Studi Kasus Pada UMKM PROVINSI DKI JAKARTA). In *Thesis*.
- Yanti, W. I. P. (2019). PENGARUH INKLUSI KEUANGAN DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM DI KECAMATAN MOYO UTARA. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1).
<https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>
- Yuliyanti, P., & Pramesti, D. A. (2021). TERCAPAINYA INKLUSI KEUANGAN MAMPUKAH DENGAN LITERASI KEUANGAN DAN FINANCIAL TECHNOLOGY? *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 29(2), 57–70. <https://doi.org/10.32477/jkb.v29i2.292>